







Sudaryat Permana, S.H., M.H.

BIKIN PERUSAHAAN itu GAMPANG

**Pedoman Praktis Mendirikan Usaha Dagang (UD),
Firma, CV (Persekutuan Komanditer),
dan PT (Perseroan Terbatas)**

**Dilengkapi dengan Contoh-contoh Dokumen
untuk Mendirikan Perusahaan:**

-  **Akta Pendirian Perusahaan**
-  **Domisili Perusahaan**
-  **Surat Izin Usaha Perdagangan**
-  **Tanda Daftar Perusahaan**
-  **Pendaftaran Merek**
-  **Dan Sertifikat Merek Perusahaan**

Sudaryat Permana, S.H., M.H.

BIKIN PERUSAHAAN ITU GAMPANG

Pedoman Praktis
Pendirian Usaha Dagang (UD),
Firma, CV (Persekutuan Komanditer),
dan PT (Perseroan Terbatas)



Bikin Perusahaan Itu Gampang

oleh: Sudaryat Permana, S.H., M.H.

© all rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Desain Sampul: Gunawan

Tata Letak: Budy H Dixigraf

Penyunting: Sarjan Dixigraf dan Giri

Diterbitkan oleh:

MedPress (Anggota IKAPI)

Jl. Irian Jaya D-24, Perum Nogotirto Elok II,

Yogyakarta 55292 Telp. (0274) 7103084

Faks. (0274) 620879

Email: medpressgroup@yahoo.com

Sudaryat Permana, S.H., M.H.

Bikin Perusahaan Itu Gampang; Penyunting: Sarjan Dixigraf dan Giri -
Cet. 1 - Yogyakarta: Media Pressindo, 2009, x + 126 hlm, 15 x 23 cm

ISBN (10) 979-788-146-6

ISBN (13) 978-979-788-146-7

I. Economics

I. Judul

II. Sarjan Dixigraf dan Giri

330

Distributor tunggal:

PT. BUKU KITA

Jl. Kelapa Hijau No. 22 RT 006/03

Ciganjur, Jagakarsa-Jakarta 12620

Telp. (021) 7888-1850

Faks. (021) 7888-1860

Email: marketingbukukita@gmail.com

Website: <http://www.distributorbukukita.com>

Cetakan Pertama, 2009

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prakata

Buku *Panduan Mendirikan Perusahaan* ini merupakan karya penulis dari sekian karya yang telah dibuat dan diterbitkan oleh beberapa penerbit. Buku ini merupakan buku praktis mengenai cara-cara mendirikan perusahaan mulai dari perusahaan perseorangan, firma, cv, dan perseroan terbatas.

Selain itu, buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh dokumen untuk mendirikan perusahaan, seperti akta pendirian perusahaan, domisili perusahaan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, sampai dengan contoh pendaftaran merek dan sertifikat merek perusahaan.

Meskipun dibuat praktis, buku ini dapat menjadi rujukan akademik. Hal ini karena buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai pengajar hukum perusahaan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan digabungkan dengan pengalaman praktik sebagai konsultan hukum perusahaan yang telah ditekuni penulis selama 12 tahun.

Akhir kata, buku ini sangat pantas dibaca oleh berbagai kalangan yang ingin mengetahui bagaimana sisi hukum dari perusahaan dan juga proses pendiriannya. Semoga buku ini bermanfaat.

Bandung, 27 Juli 2009

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Pendahuluan	vii
Bab I Definisi Perusahaan	1
Bab II Mengapa Harus Mendirikan Perusahaan?	7
Bab III Tipe Perusahaan dan Kecocokan Bisnis	17
Bab IV Teknis Mendirikan Perusahaan	51
Bab V Pengesahan Pendirian Perusahaan	59
Bab VI Membuat Perusahaan Anda Terdaftar di Bursa Saham	109
Daftar Pustaka	126

Pendahuluan

Perusahaan diibaratkan sebagai kendaraan bagi seorang pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan memiliki kendaraan, seseorang dapat bepergian ke mana saja. Begitu pun dengan pengusaha. Pengusaha yang memiliki perusahaan dapat mengkreasikan ide-ide usahanya sehingga membuat usahanya dapat berkembang dan menguntungkan. Selain sebagai kendaraan, perusahaan juga merupakan wadah atau tempat bagi pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Tanpa ada tempat maka pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya secara efektif.

Jika dilihat dari bentuk kepemilikannya, bentuk perusahaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang, sedangkan perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh lebih dari satu orang.

Adapun yang tergolong perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan dagang, usaha dagang, perusahaan bangunan, dan perusahaan otobis. Selanjutnya, yang tergolong perusahaan persekutuan, yaitu firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

Apabila dilihat dari bentuk kepemilikannya, bentuk badan usaha terbagi menjadi badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan sekarang ditambah satu lagi, yaitu badan usaha milik desa (BUMDes).

Badan usaha milik swasta terdiri atas Perusahaan Perseorangan, Firma, CV, dan Perseroan Terbatas. Badan usaha milik negara terdiri atas Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Khusus untuk Persero, perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi sahamnya minimal 51% dimiliki negara.

Bentuk-bentuk perusahaan seperti Perusahaan Dagang, Firma, CV, PT, Perum, Persero, BUMD, BUMDes, Koperasi, dan Yayasan didirikan dengan cara yang berbeda-beda. Bagaimana cara mendirikan bentuk-bentuk perusahaan tersebut adalah poin utama yang akan dibahas dalam buku ini, disamping hal-hal terkait dengan masalah pengaturan dan cara pengelolaan sampai perusahaan tersebut dapat tercatat di bursa saham sebagai perusahaan publik.

Buku panduan mendirikan perusahaan ini terdiri atas enam bab. Bab I berisi tentang definisi perusahaan. Pada bab ini diuraikan mengenai beberapa definisi perusahaan, seperti Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD), Firma, Persekutuan Komanditer (cv), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Perum, Persero, BUMD, dan BUMDes.

Bab II berisi tentang mengapa harus mendirikan perusahaan. Pada bab ini dibahas mengenai alasan seseorang mendirikan perusahaan. Hal-hal yang dikemukakan berupa keuntungan-keuntungan dalam mendirikan perusahaan.

Bab III berisi tentang tipe perusahaan dan kecocokan bisnis. Pada bab ini dibahas mengenai tipe-tipe atau jenis-jenis perusahaan dan kecocokannya dengan bisnis yang akan dijalankan oleh seorang pengusaha. Terdapat berbagai tipe perusahaan akan diuraikan, seperti Perusahaan Dagang, Firma, CV, PT, Koperasi, dan Yayasan. Pada bab

ini juga akan diuraikan mengenai kecocokan bisnis setiap tipe perusahaan.

Bab IV berisi tentang teknis mendirikan perusahaan. Pada bab ini diuraikan mengenai cara mendirikan Perusahaan Dagang (Usaha Dagang), Firma, CV, PT, Koperasi, dan Yayasan.

Bab V berisi tentang pengesahan pendirian perusahaan. Bab ini menguraikan pengesahan-pengesahan perusahaan ke instansi yang berwenang mengesahkan, seperti akta pendirian perusahaan, keterangan domisili perusahaan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, wajib daftar perusahaan, dan merek perusahaan.

Bab VI berisi tentang cara membuat perusahaan Anda terdaftar di bursa saham. Pada bab ini diuraikan mengenai langkah-langkah dan proses *go public* perusahaan, termasuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan.



Bab I

Definisi Perusahaan

Istilah perusahaan di Indonesia secara yuridis pertama kali dikenal sebagai implikasi dari dikeluarkannya Staatblaad No. 276 Tahun 1938. Staatsblaad ini mencabut Pasal 2 sampai 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disingkat dengan KUHD. Implikasi pencabutan Pasal 2 sampai 5 KUHD tersebut salah satunya adalah terjadi perubahan istilah "pedagang" menjadi "perusahaan".

Namun ternyata, pada KUHD tidak ditemukan satu pasal pun yang memberikan definisi mengenai "perusahaan". Hal ini rupanya disengaja oleh pembentuk undang-undang agar definisi atau pengertian perusahaan berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, pengertian perusahaan diserahkan pada pendapat-pendapat ahli hukum yang apabila diikuti oleh ahli hukum lain akan menjadi doktrin. Doktrin itu sendiri merupakan salah satu sumber hukum perusahaan.

Berikut ini diuraikan beberapa pendapat dari ahli hukum terkemuka tentang pengertian perusahaan.

1. Molengraaff

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuannya memperoleh keuntungan.

Unsur-unsur perusahaan menurut Molengraaff, yaitu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, serta bertindak keluar (Abdulkadir Muhammad, 1991:7).

2. Polak

Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi

yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Unsur perusahaan menurut Polak, yaitu unsur adanya perhitungan laba rugi dan unsur pembukuan. Dua unsur ini perlu ditambahkan karena pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHD yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 1991:8).

Selain pendapat dari ahli hukum, definisi perusahaan pun dapat diketahui dari peraturan perundang-undangan. Definisi menurut peraturan perundang-undangan sering dinamakan definisi secara yuridis.

Menurut Pemerintah Hindia Belanda, yang pada waktu itu membacakan "memorie van toelichting", rancangan Undang-Undang "Wetboek van Koophandel" di muka Parlemen, menerangkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri) (HMN Purwosutjipto, 1990:15).

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 diperoleh definisi atau pengertian yuridis dari perusahaan yang tercantum dalam Pasal 1 huruf (b), yaitu: "perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba".

Pengertian perusahaan secara yuridis lainnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997, ditentukan bahwa "perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang

melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia".

Apabila dibandingkan, kedua definisi perusahaan secara yuridis, baik menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, terdapat perbedaan sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 1991:10).

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan "menjalankan segala jenis usaha", sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan "melakukan kegiatan" tanpa pembatasan "dalam bidang perekonomian".
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 menggunakan kata "usaha" sebagai kegiatan dalam bidang perekonomian, pelaku atau pengusaha, yaitu orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum. Sementara Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 menggunakan kata "kegiatan" tanpa pembatasan dalam bidang perekonomian. Namun, karena undang-undang ini berkenaan dengan perusahaan, dapat diartikan bahwa kata "kegiatan" juga dalam bidang perekonomian, pelakunya adalah orang-perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Istilah dan definisi perusahaan patut dibedakan dengan istilah pekerjaan. Dalam perusahaan, unsur laba merupakan unsur yang mutlak, sedangkan pada pengertian pekerjaan, unsur laba bukanlah merupakan unsur mutlak.

Perbedaan kedua istilah tersebut penting mengingat terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan kedudukan dokter,

pengacara, notaris, akuntan. Polak berpendapat bahwa dokter, pengacara, notaris, dan akuntan menjalankan perusahaan apabila mereka dalam melaksanakan profesinya memperhitungkan laba rugi yang dapat diperkirakan dan mencatatnya dalam pembukuan. Namun, lain persoalan jika mereka bekerja pada perusahaan, seperti dokter bekerja di rumah sakit maka kedudukan dokter tersebut adalah menjalankan pekerjaan, bukan menjalankan perusahaan.

Berikut ini diuraikan mengenai unsur-unsur perusahaan yang diambil dari pengertian perusahaan dari berbagai sumber, di antaranya dari Molenggraaff, Polak, Pembentuk Undang-Undang, Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997.

1. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang, firma, cv, pt, dan koperasi. Hal ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris.

2. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi perindustrian, perdagangan, dan jasa. Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, kendaraan, obat-obatan, percetakan, dan penerbitan. Perdagangan meliputi kegiatan jual-beli, ekspor-impor, bursa efek, restoran, dan valuta asing. Jasa meliputi kegiatan transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, dan konsultasi.

3. Terus-menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian dilakukan secara terus-menerus sebagai mata pencarian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sementara atau serabutan.

4. Bersifat tetap

Kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan, atau surat izin usaha, misalnya lima tahun atau sepuluh tahun.

5. Terang-terangan

Terang-terangan ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui, dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan.

6. Keuntungan dan atau laba

Setiap kegiatan menjalankan perusahaan, tentu menggunakan modal dan berharap mendapat keuntungan sehingga modalnya akan berkembang terus-menerus.

7. Pembukuan

Pembukuan atau dokumen perusahaan harus dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, melalui pembukuan akan diketahui, apakah perusahaan untung atau rugi. Selain itu, dengan pembukuan, jika kemudian hari terjadi permasalahan, pembukuan tersebut dapat dijadikan alat bukti. Pembukuan juga berfungsi sebagai alat administrasi perusahaan dan menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka pembukuan atau dokumen perusahaan dapat dibuat dan disimpan secara elektronik dengan menggunakan media elektronik.



Bab II

Mengapa Harus Mendirikan Perusahaan?

Perusahaan merupakan wadah bagi pelaku usaha dalam menjalankan segala kegiatan usahanya. Tanpa perusahaan, maka pelaku usaha tidak dapat memiliki tempat untuk menjalankan usahanya. Sebagai bahan renungan, berikut ini diuraikan sebuah contoh yang dapat menggambarkan alasan seseorang mendirikan perusahaan sehingga dapat menjawab pertanyaan mengapa harus mendirikan perusahaan.

Keinginan seseorang yang bernama Budi Raharjo untuk mendirikan perusahaan dimulai ketika sedang mengambil pendidikan S2 dan S3 di Kanada. Saat itu, Budi Raharjo memiliki beberapa teman dari berbagai jurusan; *electrical engineering*, *computer science*, dan dari kedokteran.

Salah seorang dari mereka pernah ditugasi dosennya untuk membuat program untuk melakukan diagnosis pasien. Program tersebut mengimplementasikan sebuah *expert system* dan mencoba menganalisis penyakit yang diderita oleh pasien berdasarkan data-data yang diberikan oleh pasien tersebut.

Mereka lalu berpikir, program tersebut dapat diteruskan menjadi sebuah program komersial. Selain itu, rekan-rekan Budi Raharjo di ilmu kedokteran juga telah menggunakan alat-alat elektronik untuk melakukan operasi. Dokter-dokter muda yang terbiasa menggunakan komputer (*e-mail* dan sejenisnya) memiliki ide untuk mengomputerisasikan perangkat *laparoscopy*. Dengan modal dua ide ini, mereka sepakat untuk membuat sebuah usaha bersama dengan nama *Iqra Biomedical*. Modal mereka tidak banyak karena sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa. Apalagi Budi Raharjo dan kawan-kawan merupakan mahasiswa asing yang notabene berkeuangan pas-pasan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan mereka untuk tetap semangat mendirikan perusahaan.

Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mendokumentasikan semua yang mereka miliki dan melakukan pencarian informasi (riset) awal. Setelah itu, mereka menghubungi sebuah institusi yang bernama IRAP, *Industrial Research Assistance Programme* yang

merupakan bagian atau program dari *National Research Council*. Misi dari IRAP ini adalah membantu industri kecil dan menengah dalam mengembangkan kemampuan di bidang teknologi dan inovasi. Mereka lupa mengingat, berapa biaya yang harus dibayar kepada IRAP waktu itu, mungkin CAN \$500 (ataukah CAN \$100?). Hal yang mereka ingat adalah biayanya terjangkau. Mereka juga berkonsultasi dengan IRAP tentang kemungkinan teknologi dan bisnis mereka itu.

IRAP kemudian melakukan riset dan memberikan hasilnya dalam bentuk sebuah dokumen. Dalam dokumen tersebut ditunjukkan potensi dari bisnis, kelemahan dari bisnis mereka, kompetitor mereka, pakar-pakar di Kanada yang dapat dihubungi untuk melakukan konsultasi teknologi, dan hal-hal lain yang sangat membantu mereka dalam memfokuskan diri. Mereka juga diberi kesempatan untuk banyak melakukan konsultasi.

Berdasarkan masukan ini, mereka meneruskan untuk melakukan usaha tersebut. Sebagai catatan, inisiatif seperti IRAP ini belum ada di Indonesia. Kalau pun ada, mereka belum pernah mengetahuinya.

Namun, sayang, dalam perjalanannya, usaha yang dilakukan oleh Budi Raharjo dan kawan-kawan ini tidak berhasil karena beberapa hal berikut.

1. Mereka kehabisan dana (untuk menggaji seorang *programmer* yang bertugas melakukan dokumentasi *requirement engineering* dan menyewa tempat di *basement* rumah). Dugaan mereka bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, ternyata tidak tepat.
2. Komitmen dari calon pembeli alat (*laparoscopy*) masih belum ada karena saat itu alat tersebut terlalu *advanced* (sekarang sudah ada yang mencobanya di Italia). Mereka memresentasikannya di depan dokter-dokter di sebuah rumah sakit umum. Mereka masih belum dapat menangkap konsepnya. *We were ahead of its time.*

3. Biaya untuk melakukan pengujian di bidang *medical* sangat mahal (karena menyangkut manusia sehingga harus berhati-hati). Mereka harus mendatangkan pakar dari beberapa kota untuk mengevaluasi produk jika sudah jadi. Tentu hal ini terlalu mahal. Akibatnya, usaha mereka tersebut berhenti di tengah jalan. Namun, mereka akan mencobanya kembali.

Tahun 1995, internet mulai boleh digunakan untuk keperluan komersial. Akses ke internet mulai dibuka untuk masyarakat umum. Mulailah muncul industri akses internet yang dikenal dengan nama *Internet Service Provider* (ISP). Akhirnya, mereka pun mendirikan perusahaan ISP dengan nama Canada Overdrive Online (COOL) yang dimulai dari *basement* rumah dengan modal sebuah komputer, sebuah modem, dan sebuah koneksi ISDN. Sebagai catatan, waktu itu belum ada satu ISP yang sangat dominan seperti AOL saat ini. AOL masih kecil, tetapi tumbuh dengan cepat. Waktu itu, mereka berharap dapat menjadi AOL-nya Kanada. Itulah sebabnya nama usahanya agak menyerempet AOL.

Semenjak Netscape sukses besar dengan IPO (*Initial Public Offering*) di bursa saham, banyak orang yang ingin mendirikan perusahaan *high-tech* dan kemudian melaju ke IPO. Inilah awal munculnya “dotcom”. Usaha mereka pun mulai diminati oleh beberapa orang di komunitas. Mulailah mereka membuat dokumen bisnis, meresmikan bisnis (*incorporated*), dan menjual saham di antara “*friends and family*”. Terus terang, mereka tidak mengetahui teori-teori bisnis (khususnya *start-up*) yang kemudian mulai muncul. Bisnis kemudian meningkat sehingga mereka harus pindah ke sebuah ruko dengan menyewa saluran telepon yang lebih banyak.

Namun, tampaknya bisnis ISP tidak semudah yang disangka. Persaingan sangat ketat dan diperlukan investasi terus-menerus karena kemajuan teknologi. Modem yang tadinya hanya 9.600 bps, harus diganti ke 33,6 kbps. Baru selesai pergantian (investasi), harus diganti lagi dengan 56 kbps. Implikasinya adalah keuntungan tidak

kunjung datang, karena keuntungan harus diinvestasikan kembali. Bahkan, untuk menjaga agar kompetitif dan *breakeven*, mereka harus meningkatkan jumlah saluran telepon.

Pada akhirnya, bisnis mereka ini harus mereka jual kepada orang lain karena mereka tidak mampu mengurus sisi bisnisnya. Mereka kebetulan adalah orang-orang teknis yang melihat kesempatan (*opportunity*), tetapi tidak memiliki latar belakang bisnis yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan bisnis.

Pelajaran yang mereka peroleh dari bisnis ini adalah sebagai berikut.

1. Bisnis ISP merupakan bisnis yang tidak terlalu menguntungkan. Itulah sebabnya, saya cukup heran ketika kembali ke Indonesia dan banyak orang ingin mendirikan ISP. Saya memberikan saran-saran berdasarkan pengalaman saya. Namun, iming-iming untuk menjadi sukses lebih dominan.
2. Bisnis yang sangat ditentukan oleh teknologi seperti ini harus selalu merencanakan perkembangan teknologi agar tidak melakukan investasi terus-menerus dan tidak kunjung *break-even*.
3. Sebaiknya bisnis dijalankan oleh orang yang mengerti bisnis, bukan oleh *techie* (orang teknis). Jika sang *techie* ingin menjalankannya, harus mengerti bisnis atau mungkin pelajaran bisnis dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan teknis.

Model bisnis berikutnya yang mulai berkembang waktu itu adalah *web hosting*. Oleh karena itu, Budi Raharjo pun tidak ketinggalan. Beserta kawan-kawan (sesama mahasiswa Indonesia yang bersekolah di luar negeri) yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ia mulai berkeinginan untuk terjun ke usaha *web hosting*, lengkap dengan *programming*-nya dengan nama Iscom. Lagi-lagi dimulai dari mengumpulkan dana sesama mahasiswa Indonesia.

Sayangnya, bisnis ini juga gagal. Bagi mereka sangat berat untuk mempertanggungjawabkan hilangnya uang rekan-rekan yang dititipkan dalam bisnis ini. Kali ini kegagalan bisnis tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. Tidak adanya yang mau menekuni sisi bisnis. Kala itu, Budi Raharjo sendirian menjalankan hampir semuanya, mulai dari *set up* sistem sampai dengan *marketing*.
2. Waktu itu belum banyak orang Indonesia yang mengenal internet, apalagi *web hosting*. Lagi-lagi, mereka terlalu *advanced*.
3. Model bisnis dari *web hosting* ternyata juga masih belum jelas.

Perjalanan berikutnya, yaitu pada akhir 1997, Budi Raharjo kembali ke Indonesia di tengah krisis moneter melanda Indonesia. Kegagalan berbisnis di Kanada tersebut tidak membuat ia jera. Ia mencoba kembali membuat beberapa usaha di Indonesia.

Sebelum pulang ke Indonesia, mereka sempat mendirikan sebuah perusahaan yang memfokuskan diri pada jasa konsultasi teknologi informasi dengan nama Insan Komunikasi (ada kemiripan nama dengan Iscom) yang kemudian akhirnya berganti nama menjadi Insan Infonesia. Kali ini mereka memulai dari keluarga sendiri dengan langkah yang perlahan-lahan. Perusahaan ini sampai sekarang masih bertahan, meski masih kecil. Mudah-mudahan perusahaan ini bisa menjadi contoh sukses.

Bisnis *dotcom* mulai meledak pada tahun 1999 dan 2000. Muncullah *entity* yang bernama *venture capital* di dalam peta bisnis *Information Technology* (IT) di Indonesia. *Venture capital* sendiri sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru di dunia IT. Namun di Indonesia, *venture capital* masih merupakan sesuatu yang baru. Budi pun kemudian terbujuk untuk mencoba usaha dengan bantuan *venture capital* dari Korea. Tadinya ia tidak berkeinginan untuk membuat usaha ini karena sudah mempunyai perusahaan Insan Komunikasi (lihat bagian sebelumnya). Namun akhirnya, ia tertarik juga untuk mencoba bekerja sama dengan *venture capital*. Mulailah

mereka membuat badan usaha yang bernama INDOCISC dengan bidang: *community system development dan security* (Pada akhirnya, mereka memfokuskan pada bidang *security*).

Dari INDOCISC ini, mereka juga mengembangkan badan usaha lain yang bergerak dalam bidang pengembangan komunitas dan SDM, serta penempatan SDM IT di luar negeri. Sayangnya, badan usaha lain ini tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini terjadi karena hal-hal berikut.

1. Kurangnya orang yang fokus dalam menjalankan bisnis tersebut. Kesulitan mendapatkan SDM yang dapat menjalankan bisnis merupakan salah satu kendala besar. SDM yang berkulat di bidang teknis tidak terlalu masalah (meskipun masih kekurangan juga).
2. Jatuhnya bisnis *dotcom* (*bubble bust*) di seluruh dunia sehingga membuat banyak perusahaan IT tutup.
3. Ketidakcocokan antarpendiri dan pemegang saham. Ketika masalah muncul, mulai tampak karakter dari pihak masing-masing. Kecocokan pada tahap awal belum menjadi jaminan akan cocok terus. Hal ini sudah berulang kali terjadi.

INDOCISC sendiri akhirnya memfokuskan diri dalam bidang *security* dan tidak menangani yang lain (meskipun mereka bisa). Adanya fokus ini ternyata membawa berkah karena mereka menjadi dikenal dalam bidang *security*. Untuk pekerjaan yang *non-security*, INDOCISC bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang lebih fokus dan kompeten di bidangnya. Misalnya, jika ada yang menawarkan pekerjaan untuk melakukan desain web, disarankan untuk menghubungi rekan yang memang fokus kepada usaha tersebut. Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa ini adalah sebagai berikut.

1. Fokuskan pada satu bidang atau kompetensi tertentu. Jangan mau semua (meskipun bisa). Dalam bahasa Inggris dikenal peribahasa "*Jack of all trades, master of none*".
2. Giat dalam bidang *Research & Development* (R&D). Kami tahu bahwa kekuatan kami adalah pada sisi R&D nya.

3. Dekat dengan perguruan tinggi merupakan salah satu keuntungan untuk mendapatkan SDM (untuk melakukan R&D), teknologi, dan ide-ide. Perguruan tinggi merupakan tempat yang relatif aman dan murah untuk menguji dan mengeksplorasi ide. Mahasiswa merupakan tenaga murah yang dapat dilibatkan dalam pengembangan. Sementara itu, mahasiswa senang dilibatkan karena dia mendapatkan pengalaman industri yang nantinya bisa menjadi *track record* ketika selesai.

Selain mendirikan perusahaan, Budi Rahardjo masih aktif mengajar dan meneliti di perguruan tinggi. Dalam pergaulan di kampus dan industri, beberapa komentar yang dapat ditangkap, yaitu sebagai berikut.

1. Kadang-kadang perguruan tinggi menjadi pesaing bagi industri kecil dan menengah. Hal ini dianggap kurang *fair* bagi *entrepreneur*. Mereka bukannya dibantu, malah disaingi oleh perguruan tinggi. Ada istilah *entrepreneur university* yang menurut saya agak keliru. Ternyata, yang dimaksud dengan *entrepreneur university* adalah sang perguruan tinggi-nyalah yang menjadi *entrepreneur*. Padahal, seharusnya mahasiswanya, lulusannya, dan mungkin dosennya yang didorong dan didukung untuk menjadi *entrepreneur*, bukannya malah ditandingi. Situasi ini tidak kondusif.
2. Beberapa perguruan tinggi mengungkapkan ingin mendorong mahasiswanya untuk menjadi *entrepreneur*. Namun, pada kenyataannya belum ada laboratorium atau kurikulum yang mendukung ke arah sana. Jadi, pernyataan atau keinginan tersebut masih terbatas pada *lip service*. Hal ini perlu diubah jika memang perguruan tinggi serius ingin menciptakan *entrepreneurs*.
3. Perguruan tinggi masih belum serius dalam mengizinkan stafnya (dosen) untuk terjun membuat usaha (menjadi *entrepreneur*). Perlu dibedakan antara dosen yang mengerjakan proyek

(*mroyek*) dan dosen yang ingin mengembangkan industri dan merupakan salah satu pemain di industri tersebut. Keduanya masih dianggap sama. Padahal, yang terakhir ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi contoh nyata (*riil*) bagi mahasiswa. Kesuksesan seorang dosen masih diukur dengan ukuran konvensional (seperti jumlah makalah).

4. Belum adanya insentif dan program dari pemerintah. Program-program yang ada baru sekadar “wah” (sehingga nama pejabat yang bersangkutan dikenal), tetapi tidak memiliki visi dan langkah yang jelas dan nyata bagi pelaku bisnis.
5. Kebanyakan mahasiswa masih berjiwa “ingin kerja ke perusahaan orang lain”. Opsi mengembangkan usaha sendiri baru muncul belakangan ini dan masih belum populer.

Pelajaran yang Diperoleh

Pada bagian ini penulis ingin merangkumkan pelajaran yang diperoleh dalam mendirikan perusahaan. Beberapa sebab kegagalan dalam mendirikan perusahaan antara lain sebagai berikut.

1. Teknologi dan produk yang dihasilkan terlalu *advanced* sehingga belum diminati. Biasanya produk ini di-*drive* oleh para insinyur (*techie, engineers*).
2. Belum ada inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk membantu industri kecil seperti ini. Bahkan, ada “gangguan” seperti perpajakan untuk perusahaan yang baru tumbuh. Seharusnya, ada inisiatif untuk membantu industri kecil dengan menanggukkan perpajakan sampai perusahaan yang bersangkutan benar-benar stabil (misalnya, dengan membebaskan dari pajak sampai 10 tahun, seperti halnya yang dilakukan di Malaysia atau Taiwan). Adanya insentif ini membuat pelaku bisnis semangat untuk melakukan investasi dan membuka lapangan kerja. Topik ini merupakan hal yang penting dan perlu dibahas secara terpisah.



3. Belum ada bantuan dari pemerintah Indonesia, seperti adanya program IRAP (*Industrial Research Assistance Program*) di Kanada. Program bantuan yang ada masih bersifat proyek yang selesai setelah dana berhenti. Industri kecil terpaksa belajar sendiri dari kegagalannya. Jika digabungkan dengan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh semua industri kecil, jumlahnya akan besar. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat mahal.
4. Kurangnya SDM yang dapat menjalankan bisnis (bukan sisi teknis) yang mengerti teknologi. (Ke mana saja SDM lulusan ekonomi dan manajemen?)
5. Keharmonisan antara pendiri, pemegang saham, dan yang menjalankan bisnis belum tentu langgeng. Perlu dibuatkan aturan main (sistem) yang disepakati bersama pada awalnya sehingga tidak terjadi perpecahan di tengah jalan.
6. Kehebatan teknis bukan menjadi jaminan kesuksesan sebuah bisnis.

Sementara itu, pelajaran lain yang diperoleh dari usaha mendirikan perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Pendirian usaha biasanya dimulai dari beberapa orang yang memiliki ide, kemudian ditambah dengan kawan-kawan. Istilah yang umum adalah dari "*friends and family*". Tampaknya ini adalah *rule of thumb* dalam mendirikan *start-up* (Banyak buku yang membahas hal ini dan teori yang ada di buku tersebut memang benar karena telah saya alami.)
2. Fokus kepada satu bidang atau kompetensi merupakan salah satu kunci kesuksesan. Jangan rakus dan mau semua.
3. Orang teknis sebaiknya diberi bekal atau pengetahuan (wawasan) tentang bisnis. Pendidikan di perguruan tinggi yang memiliki jurusan teknis perlu diubah untuk mengakomodasi hal ini.



Bab III

Tipe Perusahaan dan Kecocokan Bisnis

Perusahaan apabila dilihat dari jumlah pemiliknya dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. Perusahaan perseorangan meliputi perusahaan dagang, usaha dagang, perusahaan bangunan, perusahaan otobis. Kemudian, perusahaan persekutuan meliputi persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas.

Apabila dilihat dari status pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan pada tipe perusahaan swasta dan tipe perusahaan negara atau badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan oleh pihak swasta, sedangkan perusahaan negara atau badan usaha milik Negara, yaitu perusahaan yang didirikan oleh negara.

Selanjutnya, tipe perusahaan pun dibagi berdasarkan status badan hukumnya, yaitu perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Contoh perusahaan badan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Contoh perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma, dan cv.

A. Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang (pd) adalah perusahaan yang didirikan serta dimiliki oleh perseorangan. Perusahaan dagang merupakan bentuk dari perusahaan perseorangan yang sering dibandingkan dengan perusahaan persekutuan (perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang).

Selain perusahaan dagang, dalam praktik masih terdapat bentuk lain dari perusahaan perseorangan, yaitu usaha dagang atau disingkat (ud), perusahaan bangunan (pb), perusahaan otobis (po).

Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, pengaturan perusahaan dagang berdasarkan hukum kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan dalam mendirikan perusahaan dagang yang diikuti oleh terus-menerus sehingga menjadi hukum dan diikuti serta dipatuhi.

Pembubaran perusahaan dagang dilakukan dengan membuat akta pembubaran perusahaan tersebut. Pentingnya pembuatan akta pembubaran tiada lain dalam rangka melindungi pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan perusahaan dagang yang akan bubar tersebut.

Setelah perusahaan dagang bubar, dilanjutkan dengan penghitungan harta dan utang perusahaan. Apabila masih ada selisih utang, utang itu ditanggulangi oleh harta pribadi pemilik perusahaan dagang.

Keistimewaan perusahaan dagang adalah apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dinikmati oleh pemilik perusahaan. Misalnya saja, Ahmad memiliki perusahaan dagang bernama PD Arum. PD Arum mendapatkan keuntungan sebesar Rp400 juta untuk tahun 2007. Keuntungan tersebut semuanya menjadi milik dari Ahmad sebagai pemilik PD Arum.

Namun sebaliknya, apabila perusahaan dagang mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung atau menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan dagang itu sendiri sampai harta pribadi. Misalnya, PD Arum mengalami kerugian sebesar Rp500 juta tahun 2008 dan harta PD Arum sebesar Rp 100 juta. Tanggung jawab Ahmad sebagai pemilik PD Arum tidak sebesar Rp100 juta, tetapi Rp 500 juta. Oleh karena itu, segala harta kekayaan pemilik PD Arum menjadi jaminan untuk pembayaran guna menutup kekurangan kerugian PD Arum, yaitu Rp 400 juta. Hal ini didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala kebendaan, baik yang

ada sekarang maupun yang akan ada pada kemudian hari, bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, menjadi jaminan bagi pembayaran utang-utangnya.

Keistimewaan lain adalah pada pengambilan keputusan, pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak yang lain. Hal ini merupakan keuntungan karena untuk perusahaan lain yang pemiliknya lebih dari satu orang, pengambilan keputusan harus menunggu pihak lain atau meminta persetujuan pihak lain. Jika tidak mendapat persetujuan, keputusan atas nama perusahaan tidak dapat dilakukan.

Apabila melihat pada kecocokan bisnis, perusahaan perseorangan ini cocok untuk skala usaha kecil, usaha keluarga, atau usaha yang tidak memerlukan modal yang besar dengan tingkat pengambilan keputusan yang cepat karena tidak perlu meminta persetujuan pihak lain untuk mengambil keputusan.

B. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan Perdata atau *Maatschap* adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata).

Berdasarkan pengertian persekutuan perdata tersebut, jika dianalisis terdapat 3 unsur persekutuan perdata, yaitu sebagai berikut.

1. Perjanjian
2. Pemasukan ke dalam perusahaan
3. Membagi keuntungan

Unsur pertama, yaitu perjanjian menunjukkan bahwa persekutuan perdata didirikan oleh lebih dari satu orang.

Unsur kedua, yaitu pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan atau dikenal dengan istilah *imbrengh*. Pemasukan berupa uang diatur

dalam Pasal 1626 KUHPerdata: apabila ketentuan waktu untuk pemasukan seperti halnya ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, dia harus membayar bunga selama belum disetor. Sementara untuk pemasukan berupa benda-benda atau barang, sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain dan terhadap adanya cacat yang tersembunyi. Di samping itu, sekutu dapat pula memasukkan penggunaan atau manfaat (hak memakai) dari benda-benda tersebut ke dalam persekutuan (Pasal 1631 Ayat (1) KUHPerdata, apabila yang dimasukkan hanyalah kemanfaatan atau penggunaan (hak memakai) terhadap barang tersebut, maka terhadap risiko yang terjadi pada benda/barang tersebut sekutu yang bersangkutan mempunyai kewajiban menanggung sendiri).

Unsur ketiga dari *maatschap* adalah membagi keuntungan. Jika persekutuan perdata mendapatkan keuntungan, jika tidak diperjanjikan lain, keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan prinsip keseimbangan. Artinya, sekutu yang lebih besar memberikan *imbrengh* tentu mendapatkan pembagian keuntungan yang lebih besar, jika dibandingkan dengan sekutu yang memberikan *imbrengh* lebih kecil.

1. Hubungan Intern dan Hubungan Ekstern dalam Persekutuan Perdata

- a. Hubungan intern para sekutu diatur dalam Pasal 1624 KUHPerdata sampai Pasal 1641 KUHPerdata.
 - 1) Tiap-tiap sekutu harus memenuhi kesanggupannya untuk memberikan pemasukan dengan ketentuan jika pemasukannya berupa benda, sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain dan terhadap cacat yang tersembunyi. Termasuk segala risiko dari benda yang dimasukkannya. Apabila pemasukannya berupa uang, sekutu wajib memberikan bunga selama uang itu belum disetor ke persekutuan. Pemasukan berupa tenaga harus disesuaikan dengan kebutuhan persekutuan.

- 2) Tidak boleh seorang sekutu lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama.
- 3) Pengurusan persekutuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian, sekutunya dinamakan sekutu statuter atau diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus, sekutu ini dinamakan sekutu mandater. Sekutu statuter tidak dapat diberhentikan, kecuali dengan alasan hukum yang kuat. Sementara sekutu mandater dapat diberhentikan sewaktu-waktu karena dianggap sebagai penerima kuasa biasa.
- 4) Pengurusan berbeda dengan penguasaan. Dalam pengurusan, tidak diperlukan persetujuan dari sekutu lain, sedangkan dalam perbuatan penguasaan diperlukan persetujuan sekutu yang lain.
- 5) Para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi kawannya, jadi semacam pemberian kuasa secara diam-diam.
- 6) Keuntungan tidak boleh diperjanjian untuk satu sekutu, tetapi kerugian dapat diperjanjikan ditanggung oleh satu sekutu.
- 7) Penambahan sekutu hanya diperbolehkan, jika disetujui secara bulat oleh semua sekutu yang ada.
- b. Hubungan ekstern para sekutu dengan pihak ketiga diatur dalam Pasal 1642 KUHPperdata sampai 1645 KUHPperdata.

Seorang sekutu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu yang lain, jika nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu yang lain dan hasilnya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan. Apabila perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama, semua sekutu bertanggung jawab sama rata meskipun pemasukannya berbeda-beda.

2. Jenis-Jenis Persekutuan Perdata

Terdapat dua jenis persekutuan perdata, yakni persekutuan perdata umum dan persekutuan perdata khusus.

a. Persekutuan perdata umum

Pemasukan yang terdiri atas seluruh harta kekayaan setiap sekutu atau bagian tertentu dari harta kekayaan secara umum, artinya tanpa perincian. Persekutuan perdata ini dilarang oleh Pasal 1621 KUHPperdata. Alasannya, karena dengan adanya pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa perincian itu, orang tidak dapat membagi keuntungan secara adil, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1633 KUHPperdata. Pasal 1633 KUHPperdata menentukan bahwa apabila bagian keuntungan dari setiap sekutu tidak ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata, pembagian keuntungan harus didasarkan atas keseimbangan pemasukan dari setiap sekutu.

Persekutuan perdata umum diperkenankan juga jika diperjanjikan bahwa setiap sekutu akan mencurahkan seluruh kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang dapat dibagi-bagi antara para sekutu. Persekutuan perdata jenis ini oleh Pasal 1622 KUHPperdata dinamakan persekutuan perdata keuntungan.

b. Persekutuan perdata khusus

Para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari pada tenaga kerjanya (Pasal 1623 KUHPperdata).

3. Pembubaran Persekutuan

Pembubaran persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1646 KUHPperdata sampai 1652 KUHPperdata. Persekutuan perdata bubar jika sebagai berikut.

- a. Jangka waktu pendirian persekutuan perdata berakhir.
- b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan.

- c. Kehendak dari seorang atau beberapa sekutu.
- d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dinyatakan pailit.

Setelah pembubaran dilakukan, maka diteruskan dengan proses pemberesan harta dan utang persekutuan.

Apabila melihat pada kecocokan bisnis, jenis persekutuan perdata ini cocok untuk usaha yang dimiliki oleh lebih dari dua orang yang ingin sama-sama mendirikan dan membagi risiko dalam pendirian perusahaan. Di kalangan warga keturunan seperti Tionghoa, bentuk perusahaan persekutuan perdata ini dikenal juga dengan nama kongsi. Skala usahanya lebih besar dari skala usaha kecil, tetapi lebih kecil dari skala usaha besar.

C. Firma

Firma diatur dalam Pasal 16 sampai 35 KUHD. Selain itu, karena firma itu merupakan persekutuan perdata khusus, yang menjadi ketentuan umum dari firma adalah ketentuan persekutuan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata sampai 1652 KUHPerdata.

Pasal 16 KUHD memberikan pengertian tentang firma, yaitu tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama adalah nama yang disepakati oleh para pendiri firma. Misalnya, firma didirikan oleh Yani Aria, Hadi Sucipto, dan Sudaryat Permana. Nama firmanya adalah Aria, Hadi & Partners.

Persekutuan firma merupakan persekutuan perdata khusus. Kekhususan firma terletak pada empat unsur, yaitu persekutuan perdata (Pasal 16), menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD), dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD), dan pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Unsur menjalankan perusahaan merupakan unsur mutlak. Oleh karena itu, persekutuan firma harus menjalankan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHD, yaitu membuat pembukuan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Sementara unsur nama bersama adalah nama yang disetujui oleh para pendiri firma atau para sekutu firma. Nama bersama dapat diambil dari nama dari salah seorang sekutu, nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, atau nama lain yang bukan nama keluarga.

Misalnya saja, Ny. Hadiputranto, Ny. Hadinoto, dan kawannya mendirikan sebuah kantor hukum dengan nama yang mereka sepakati adalah Hadiputranto, Hadinoto & Partners atau disingkat HHP. Nama tersebut merupakan nama bersama yang dipakai untuk nama firma, yaitu firma hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners.

Sekutu dalam firma terdiri atas sekutu yang dikecualikan dan sekutu yang tidak dikecualikan. Perbedaan antara sekutu yang dikecualikan dan sekutu yang tidak dikecualikan terletak pada kewenangan bertindak sekutu tersebut atas nama persekutuan. Jika ada sekutu yang kewenangan bertindakya dibatasi, sekutu tersebut dinamakan sekutu yang dikecualikan. Sementara jika kewenangan dari sekutu tersebut tidak dibatasi, sekutu tersebut digolongkan sebagai sekutu yang tidak dikecualikan. Meskipun terdapat perbedaan kewenangan antara sekutu yang dikecualikan dengan sekutu yang tidak dikecualikan, pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sama sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD.

Semua sekutu dalam firma tergolong sekutu pengurus yang bertindak untuk dan atas nama firma. Tindakan sekutu firma tersebut jika menimbulkan kerugian, ditanggung secara renteng oleh para sekutu. Misalnya, Firma ABC melakukan perbuatan hukum dengan D. Perbuatan tersebut ternyata merugikan Firma ABC. Total kerugian firma sebesar 100 juta. Tanggung jawab ekstern A, B, dan C masing-

masing 100 juta. Jika sudah diselesaikan oleh salah satu sekutu, misalnya oleh A, hubungan hukum dengan D berakhir, dan yang tersisa adalah hubungan intern antara A, B, dan C berkenaan dengan tanggung jawab masing-masing.

KUHD tidak mengatur mengenai hubungan internal di antara para sekutu. Oleh karena firma tersebut merupakan persekutuan perdata, hubungan antara para sekutu firma diatur dalam Pasal 1624 sampai 1641 KUHPperdata. Pembagian keuntungan di antara para sekutu juga mengacu pada ketentuan persekutuan perdata, yakni jika tidak diperjanjikan lain, pembagian keuntungan dibagi antara para sekutu sesuai besarnya pemasukan di antara para sekutu.

Hubungan intern pada sekutu digambarkan sebagai berikut.

1. Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam anggaran dasar sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma.
2. Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma.
3. Semua sekutu memberikan persetujuan, jika firma menambah sekutu baru.
4. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan, jika diatur dalam anggaran dasar.
5. Seorang sekutu dapat menggugat firma apabila dia berposisi sebagai kreditor firma dan pemenuhannya disediakan dari kas firma.

Hubungan ekstern antara sekutu firma dan pihak ketiga digambarkan sebagai berikut.

1. Sekutu yang sudah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum ditunaikan.
2. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya.

3. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan firma, yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum.
4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, pihak ketiga dapat membuktikan adanya firma dengan segala macam alat bukti.

Pembubaran persekutuan firma berlaku ketentuan pembubaran persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 KUHPperdata s.d. Pasal 1652 KUHPperdata ditambah dengan Pasal 31 s.d. 35 KUHD, yaitu firma bubar apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian) telah berakhir. Firma juga dapat bubar sebelum jangka waktu berakhirnya firma dalam anggaran dasar berakhir akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.

Pembubaran firma harus dilakukan dengan akta autentik, kemudian akta pembubaran didaftarkan di panitera pengadilan negeri untuk kemudian diumumkan pada tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman pembubaran firma mengakibatkan pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, atau perubahan menjadi tidak berlaku.

Sesudah firma dibubarkan, maka dilanjutkan dengan langkah pemberesan, yaitu penghitungan harta dan utang firma. Untuk pemberesan tersebut, firma yang sudah bubar masih tetap ada (Pasal 32-34 KUHD). Menurut Pasal 32, yang bertugas melakukan pemberesan adalah mereka yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, sekutu pengurus harus membereskan atas nama firma. Namun, jika sekutu-sekutu dengan suara terbanyak menunjuk sekutu yang bukan pengurus untuk melakukan pemberesan, sekutu itulah yang bertugas melakukan pemberesan. Jika suara terbanyak tidak tercapai, Pengadilan Negeri menetapkan pihak pemberesnya. Hubungan hukum antara para sekutu dan pemberes adalah hubungan hukum pemberian kuasa.

Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua utang firma dengan menggunakan uang kas firma. Apabila masih ada saldo, saldo itu dibagi antara para sekutu. Jika ada kekurangan, kekurangan itu harus dipenuhi dari kekayaan pribadi para sekutu. Jika ada kekayaan berupa barang, pembagian itu dilakukan seperti pembagian warisan (Pasal 1652 KUHPerdara).

Dengan kata lain, apabila masih ada harta sisa firma, harta tersebut dibagikan kepada para sekutu. Namun, apabila ada kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh para sekutu secara renteng penuh sampai harta pribadi.

Perusahaan firma ini cocok untuk perusahaan konsultan hukum, konsultan manajemen, konsultan keuangan, konsultan pemasaran, konsultan *engineering*, dan lain-lain yang lebih bersifat persekutuan orang dengan dasar kepercayaan yang tinggi antara para sekutu.

D. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga ke dalam persekutuan, sedangkan sekutu yang bersangkutan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. Lain lagi dengan sekutu komplementer, yaitu sekutu yang tidak hanya menyetorkan uang, barang, atau tenaga juga mengurus atau mengelola persekutuan. Sekutu komplementer ini disebut juga dengan sekutu pengurus. Dua macam sekutu dalam CV ini secara bersama menyerahkan pemasukan pada persekutuan guna memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan sekutu masing-masing.

Pengaturan persekutuan komanditer berada di antara pengaturan firma, yaitu diatur dalam Pasal 19 sampai 21 KUHD.

Sementara firma diatur dalam Pasal 16 sampai 35 KUHD. Oleh karena itu, persekutuan komanditer yang sering disingkat dengan CV merupakan variasi firma. Di samping pengaturan firma, berlaku juga ketentuan persekutuan perdata atau *maatschap*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 sampai 1652 KUHPerdara.

Persekutuan komanditer bentuknya ada tiga, yakni sebagai berikut.

1. Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Keluar, persekutuan ini sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam merupakan persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer diam-diam ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 sampai 21 KUHD. Dengan begitu, KUHD tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai sekutu komanditer kepada pihak ketiga. Ke dalam dan keluar merupakan persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer terang-terangan tidak diatur secara khusus di dalam KUHD sebab persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer jadi ketentuan-ketentuan firma sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai 35 KUHD berlaku bagi cv, khususnya untuk sekutu komplementer. Sementara untuk sekutu komanditer diatur dalam anggaran dasar.
3. Persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Persekutuan komanditer ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi juga tidak dilarang dalam KUHD. Pembentukan modal

dengan cara menerbitkan saham diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPdata. Sifat kekeluargaan pada persekutuan komanditer atas saham mulai mengendor, jika dibandingkan dengan pesekutuan komanditer terang-terangan yang pada hakikatnya adalah firma. Hal ini terbukti dari saham yang dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat juga bukan teman.

Persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke perseroan terbatas. Persekutuan komanditer ternyata telah mendesak firma dalam praktek perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena keadaan yang menghendaki supaya pihak luar yang bukan anggota keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama.

Tanggung jawab sekutu komanditer dengan tanggung jawab sekutu komplementer berbeda. Tanggung jawab sekutu komanditer bersifat terbatas, artinya dibatasi sesuai dengan uang, barang, atau tenaga yang dimasukkan dalam persekutuan. Hal ini berbeda dengan sekutu komplementer yang bertanggung jawab penuh atau tidak terbatas yang tanggung jawabnya sama dengan sekutu dalam firma, yaitu bersifat renteng penuh sampai harta pribadi.

Misalnya, CV Indika didirikan oleh Indra, Cahya, Adinda, dan Irma. Indra dan Cahya sebagai sekutu komanditer, sedangkan Adinda dan Irma sebagai sekutu komplementer. Tiga tahun kemudian, CV Indika mengalami kerugian dengan total kewajiban terhadap pihak ketiga sebesar Rp800 juta. Sementara total harta CV Indika hanya sebesar Rp 200 juta. Modal dari Indra sebesar Rp10 juta, modal dari Cahya sebesar Rp20 juta, modal dari Adinda sebesar Rp30 juta, dan modal dari Irma sebesar Rp40 juta. Dari total kewajiban terhadap pihak ketiga

sebesar Rp800 juta, kemudian dikurangi dengan total harta CV Indika sebesar Rp200 juta, maka sisa kewajiban terhadap pihak ketiga sebesar Rp600 juta. Tanggung jawab dari Indra dan Cahya sebagai sekutu komanditer maksimal untuk Indra sebesar Rp10 juta dan Cahya sebesar Rp20 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp570 juta menjadi kewajiban Adinda dan Irma secara renteng.

Pembubaran persekutuan komanditer sama dengan bubarnya persekutuan firma, pembubaran persekutuan firma sama dengan bubarnya persekutuan perdata. Oleh karena itu, pengaturan pembubaran persekutuan komanditer diatur dalam Pasal 1646 sampai 1652 KUHPdata ditambah dengan Pasal 31 sampai 35 KUHD, yaitu karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar, sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu atau akibat dari perubahan anggaran dasar.

Karena pembubaran persekutuan komanditer sama dengan pembubaran firma, pembubaran persekutuan komanditer harus dilakukan dengan cara pembuatan akta pembubaran di notaris, pendaftaran akta pembubaran di Panitera Pengadilan Negeri tempat cv berkedudukan dan pengumuman pembubaran cv pada tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga.

Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pemberesan, yaitu penghitungan harta dan utang persekutuan. Apabila masih ada harta, harta tersebut dibagikan kepada para sekutu, tentu bagian dari sekutu komplementer lebih besar dibandingkan dengan bagian untuk sekutu komanditer. Namun, apabila yang tersisa berupa kerugian, kerugian tersebut lebih besar ditanggung oleh sekutu komplementer secara renteng dan sekutu komanditer sebesar modal yang disetorkan ke dalam CV.

Perusahaan ini cocok untuk segala jenis usaha yang skala usahanya lebih besar dari skala usaha kecil, tetapi lebih kecil dari skala usaha besar. Perusahaan ini cocok didirikan oleh pengusaha pemula yang ingin melakukan kegiatan usaha bersama dengan orang lain, tetapi memiliki modal yang tidak terlampau besar.

E. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 Angka (1) UUP).

Dari pengertian yuridis pt tersebut maka unsur-unsur pt, yaitu badan hukum, didirikan dengan perjanjian, dan modalnya terdiri atas saham-saham. Syarat materiil badan hukum, yaitu memiliki kekayaan yang dipisahkan antara kekayaan pendiri dan kekayaan perseroan, adanya organisasi yang teratur, memiliki tujuan tertentu, dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Di samping syarat materiil, terdapat juga syarat formal, yaitu didirikan dengan perjanjian, adanya pengesahan dari pejabat yang berwenang, didaftarkan, dan diumumkan.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pemerintah yang telah berlaku sebelum Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 sendiri merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

terbatas, yang juga merupakan perubahan terhadap ketentuan Perseroan Terbatas dalam Pasal 16 sampai 35 KUHD.

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambilliah semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Jika RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak menyetujui secara bulat, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul (Pasal 13).

Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.

Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Perbuatan hukum tersebut hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan apabila perbuatan tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan (Pasal 14 UUP).

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, tidak tertutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan tanpa nilai nominal

(Pasal 31). Besarnya modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Paling sedikit 25 % dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 32 dan 33). Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaiannya ditentukan berdasarkan nilai wajar yang telah ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Apabila terjadi penambahan modal dasar, penambahan tersebut harus ada persetujuan dari RUPS. Begitu pun dalam hal pengurangan modal.

Pengelolaan perseroan dilakukan oleh organ perseroan, yaitu direksi. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 Ayat (1)). Persyaratan untuk menjadi direksi, yaitu orang-perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Anggota direksi diangkat oleh RUPS serta bertanggung jawab kepada RUPS. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun, jika jumlah anggota direksinya dua atau lebih, tanggung jawab mereka bersifat renteng.

Tanggung jawab tersebut tidak dapat dimintakan apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan hati-hati sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian atau telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal 97).

Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 Ayat (1)). Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Anggota direksi dapat diberhentikan sementara oleh dewan komisaris dengan menyebut alasannya. Pengelolaan perseroan diawasi oleh dewan komisaris. Selain itu, dewan komisaris juga berhak untuk memberikan saran atau masukan kepada direksi tersebut.

Untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib juga mempunyai dewan pengawas syariah atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Anggota komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Dua atau lebih perseroan dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk

mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut. Setiap direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan harus menyiapkan rencana penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan. Rencana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS perseroan masing-masing. Apabila telah disetujui, dilakukan akta penggabungan atau akta peleburan atau akta pengambilalihan.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan sebagian aktiva dan pasiva perusahaan dinamakan pemisahan tidak murni, sedangkan pemisahan seluruh aktiva dan pasiva perseroan dinamakan pemisahan murni.

Bagi perseroan terbatas yang bidang usahanya mengelola sumber daya alam atau bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, maka ada kewajiban berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen, tetapi juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini dan untuk jangka panjang.

Dalam rangka menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat maka perlu dilaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 Angka (3) UUPT).

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 Ayat (1) UUPT). Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sementara perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi tanggung jawab sosial yang sering digunakan istilah *corporate social responsibility (CSR)* dan tanggung jawab lingkungan. Perseroan sebagai badan hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum sendiri harus juga memerhatikan lingkungan sekitar karena lingkungan sekitar atau masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* perseroan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban (Pasal 74 Ayat (2) UUPT). Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

(Pasal 74 Ayat (3) UUPT). Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 74 Ayat (4) UUPT).

Selanjutnya, berkaitan dengan tanggung jawab pemegang saham sebuah perseroan terbatas. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimiliki (Pasal 3 Ayat (1)). Misalnya, PT Adromeda yang didirikan oleh Amir dan Andi mengalami kerugian dengan total kewajiban terhadap pihak ketiga sebesar Rp2 miliar maka tanggung jawab maksimal dari Amir dan Andi sebagai pemegang saham, yaitu sebesar saham yang dimiliki Amir dan Andi. Apabila saham yang dimiliki Amir sebesar Rp200 juta dan saham yang dimiliki Andi sebesar Rp300 juta, tanggung jawab Amir hanya sebesar Rp200 juta dan tanggung jawab Andi sebesar Rp300 juta.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan (Pasal 3 Ayat (2)). Misalnya saja, PT Adromeda belum berstatus badan hukum, maka tanggung jawab Amir dan Andi tidak sebesar saham yang mereka miliki, tetapi bertanggung jawab penuh setelah total kewajiban tersebut dikurangi dengan harta dari PT Adromeda. Sebut saja total harta PT Adromeda sebesar Rp600 juta, maka sisa kewajiban terhadap pihak ketiga sebesar Rp1,4 miliar menjadi tanggung jawab dari Amir dan Andi.

Pembubaran perseroan dapat terjadi karena berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi*, dan karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi (Pasal 142 UUPT). Setelah bubar, perseroan tersebut dilakukan likuidasi, yaitu penghitungan harta dan utang perseroan.

Perusahaan terbatas ini cocok untuk skala usaha besar untuk semua jenis usaha dan usaha yang diprediksikan akan berkembang menjadi besar dengan melibatkan berbagai pemegang saham.

F. Koperasi

Koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut UUP. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 Angka 1 UUP). Tujuan utama didirikan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggotanya karena koperasi didirikan untuk dan oleh anggota koperasi (Pasal 3 UUP).

Menurut Pasal 6 UUP, ada dua bentuk koperasi, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh minimal 20 orang anggota, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh minimal 3 koperasi primer.

Dilihat dari usahanya, terdapat beberapa jenis koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi serba usaha. Jenis usaha koperasi simpan pinjam, yaitu

menerima simpanan dari anggota juga memberikan pinjaman kepada anggota. Jenis usaha koperasi konsumsi, yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan konsumsi anggota koperasi.

Koperasi konsumsi produksi, yaitu koperasi yang bidang usahanya memproduksi suatu produk, baik barang atau jasa yang dapat dijual kepada konsumen. Apabila bidang usahanya meliputi simpan pinjam, konsumsi dan produksi dinamakan koperasi serba usaha.

Di samping bentuk-bentuk koperasi tersebut, masih ada bentuk koperasi fungsional yang biasanya didirikan oleh karyawan perusahaan, didirikan oleh pegawai suatu instansi atau lembaga pemerintah.

Dalam rangka memberikan pendidikan koperasi pada usia dini, sekolah-sekolah biasanya mendirikan koperasi sekolah. Untuk tingkat mahasiswa, biasanya didirikan koperasi mahasiswa. Tujuan pendirian koperasi siswa dan koperasi adalah di samping memenuhi kebutuhan siswa atau mahasiswa sendiri, lebih jauh lagi untuk memberikan proses pembelajaran wirausaha bagi siswa dan mahasiswa. Hal ini karena mereka biasa terlibat dalam kegiatan usaha koperasi tersebut, baik sebagai pengurus koperasi, pengawas koperasi, maupun hanya menjadi anggota koperasi.

Dalam melakukan usahanya, koperasi harus mengikuti tujuh prinsip pengelolaan koperasi (Pasal 5 UUP), yaitu sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sukarela, maksudnya untuk menjadi anggota koperasi tidaklah ada paksaan, mau menjadi anggota ataupun mau keluar dari keanggotaan koperasi terserah anggota sendiri. Terbuka maksudnya, untuk menjadi anggota koperasi tidak dibatasi oleh suku, agama, ras, dan golongan. Asalkan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi anggota maka dapat menjadi anggota.

2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis

Pengelolaan koperasi dilakukan dengan melibatkan peran serta aktif semua anggota. Dalam setiap keputusan yang akan dibuat, musyawarah untuk mufakat selalu ditempuh dahulu sebelum dilakukan pemungutan suara. Dalam musyawarah, satu anggota memiliki satu suara dan suara tidak identik dengan besarnya simpanan pokok, wajib, dan sukarela dari anggota.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha setiap anggota

Sisa hasil usaha yang merupakan keuntungan koperasi dibagikan kepada para anggota dengan pertimbangan sesuai dengan jasa para anggota. Jasa dihasilkan dari keaktifan dari para anggota koperasi. Hal ini karena dalam koperasi anggota koperasi tidak hanya sebagai pemilik koperasi, tetapi juga sebagai konsumen koperasi.

4. Pemberian balas jasa terbatas pada modal

Dalam pengelolaan koperasi, diusahakan agar biaya untuk menjalankan usaha koperasi tidak lebih besar dari sisa hasil usaha atau keuntungan dari koperasi itu sendiri. Dengan kata lain, efisiensi dalam pengelolaan koperasi mutlak diperlukan.

5. Kemandirian koperasi

Pertumbuhan koperasi tidak didapatkan dari adanya proteksi, adanya bantuan dari pihak lain, tetapi dari usaha itu sendiri. Tidak ada ketergantungan koperasi dengan usaha lain. Koperasi harus dapat mandiri.

6. Kerja sama antarkoperasi

Antara koperasi yang satu dan koperasi yang lain diperlukan adanya kerja sama. Dengan demikian, koperasi menjadi kuat dan dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta.

7. Pendidikan koperasi

Pengurus dan pengawas koperasi diangkat dari anggota koperasi. Oleh karena itu, semua anggota koperasi harus siap untuk menjadi pengurus dan pengawas koperasi. Kesiapan tersebut diwujudkan dengan adanya pendidikan koperasi.

Ketujuh prinsip pengelolaan koperasi tersebut merupakan ciri khas koperasi. Apabila pada masyarakat ada yang menggunakan nama koperasi, tetapi dalam pengelolaannya tidak mengaplikasikan ketujuh prinsip koperasi tersebut, bukan merupakan koperasi melainkan bentuk usaha yang berkedok koperasi.

Modal koperasi menurut Pasal 41 UUP terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela dari para anggota, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok adalah simpanan yang dilakukan sekali dalam masa keanggotaan koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oleh anggota koperasi. Simpanan sukarela adalah simpanan yang jumlah maupun waktunya tidak dibatasi oleh koperasi. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh koperasi dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga pembiayaan, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Di samping itu, koperasi dapat memupuk modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. Pihak yang menyertakan modal ikut menanggung risiko, tetapi dalam rapat anggota tidak memiliki hak suara. Pemupukan modal penyertaan dilakukan dengan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris.

Pengelolaan koperasi dilakukan oleh perangkat organisasi koperasi sebagai organ koperasi. Terdapat tiga perangkat organisasi koperasi, yakni sebagai berikut.

1. Rapat Anggota

Menurut Pasal 22 UUP, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila tidak tercapai keputusan, dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (Pasal 24 UUP). Rapat Anggota dilakukan minimal sekali dalam setahun. Di samping itu, ada rapat anggota luar biasa yang diselenggarakan lebih dari satu kali bergantung pada kebutuhan koperasi itu sendiri. Rapat Anggota juga memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, mengubah anggaran dasar dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain yang bersifat strategis bagi koperasi.

2. Pengurus

Menurut Pasal 29 UUP, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan untuk kali pertama nama-nama pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Pengawas

Menurut Pasal 38 UUP, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh karena itu, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Di samping bertugas mengawasi pengurus dalam mengelola koperasi, pengawas juga diberi kewenangan untuk memberi saran kepada pengurus koperasi, baik bersifat umum maupun khusus.

Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola koperasi dalam menjalankan usaha koperasi. Hubungan hukum antara pengurus koperasi dan pengelola koperasi adalah perjanjian kerja. Untuk segala akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja, tunduk pada perjanjian kerja.

Pembubaran koperasi menurut Pasal 46 UUP dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau berdasarkan keputusan pemerintah. Pembubaran koperasi dengan putusan pemerintah dilakukan apabila sebagai berikut:

1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang;
2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Setelah koperasi bubar, maka dilanjutkan dengan penyelesaian. Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan koperasi dalam penyelesaian, yaitu perhitungan harta dan utang koperasi.

Perusahaan berbentuk koperasi ini cocok didirikan oleh banyak orang untuk kepentingan bersama dengan hasil yang dapat dinikmati bersama. Asasnya adalah kekeluargaan.

G. Yayasan

Pengaturan yayasan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menggunakan hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan-kebiasaan pendiri yayasan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu 6 Agustus 2001 mulai diberlakukan pada 6 Agustus 2002. Dua tahun kemudian, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 yang mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Dengan demikian, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari pengertian yuridis tersebut menunjukkan bahwa yayasan merupakan lembaga nirlaba, artinya lembaga yang tujuan pokoknya tidak semata-mata mencari keuntungan. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan yayasan beserta batasannya diatur dalam Pasal 7 dan 8, yaitu mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang prosepektif dengan ketentuan paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan, anggota pembina, pengurus, dan pengawas dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha.

Pengaturan yayasan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menggunakan hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan-kebiasaan pendiri yayasan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu satu tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 6 Agustus 2001 dan berlaku tanggal 6 Agustus 2002. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 2004 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 yang mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan, diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Dengan demikian, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.

Saat ini, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 belum diberlakukan sehingga dasar pengaturan yayasan sekarang adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jika Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 efektif diberlakukan, tidak berarti keseluruhan muatan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 semuanya dinyatakan tidak

berlaku. Hal ini didasarkan karena perubahan undang-undang tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi terhadap beberapa pasal-pasal saja. Dengan demikian, pasal-pasal yang tidak diubah dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tetap berlaku.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari pengertian yuridis tersebut, menunjukkan bahwa yayasan merupakan lembaga nirlaba. Artinya, lembaga yang tujuan pokoknya tidak semata-mata mencari keuntungan. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan yayasan beserta batatasannya diatur dalam Pasal 7 dan 8, yaitu: mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang prosepektif dengan ketentuan paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan, anggota pembina, pengurus, dan pengawas dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha.

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas (Pasal 3 ayat (2)). Namun, berdasarkan Pasal 6, yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan.

Sepintas lalu, kedua pasal tersebut saling bertentangan. Jika ditelaah lagi lebih mendalam, ternyata kedua pasal tersebut tidak

saling bertentangan karena yang tidak diperbolehkan dibagikan kepada organ yayasan adalah harta kekayaan yayasan, tetapi jika digunakan untuk keperluan biaya organ yayasan dimungkinkan. Ketegasan dari Pasal dijemantani oleh Pasal 5 yang mengatur mengenai larangan pengalihan kekayaan yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas, kecuali anggaran dasar yayasan menentukan bahwa pengurus bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas, serta melaksanakan pengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, proses pendirian cukup pembuatan akta pendirian yayasan di Notaris untuk kemudian akta pendiriannya didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri tempat yayasan tersebut berkedudukan. Namun, sesudah diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, maka proses pendiriannya menjadi lebih kompleks.

Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendirian yayasan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pengesahan harus disampaikan dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Menurut Pasal 13 A Undang-Undang Yayasan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara renteng.

Kekayaan yayasan diatur dalam Pasal 26 dan 27. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai kekayaan yayasan tidak ditentukan besarnya dalam undang-undang yayasan. Hal ini memberi kebebasan bagi pendiri yayasan untuk menentukan sendiri berapa nilai kekayaan yayasan. Harus dipastikan bahwa kekayaan yayasan tersebut terpisah dari kekayaan pendiri yayasan. Untuk hal tersebut maka setelah pendiri yayasan memisahkan kekayaannya untuk yayasan, kekayaan tersebut menjadi milik yayasan, bukan pendiri yayasan. Bahkan, apabila yayasan bubar sekalipun, kekayaan yayasan akan dilimpahkan kepada yayasan yang memiliki misi yang sama dengan yayasan atau jika tidak, kekayaan yayasan tersebut menjadi kekayaan negara.

Pengelolaan yayasan dilakukan oleh organ yayasan itu sendiri. Terdapat tiga organ dalam yayasan. Ketiga organ tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Kewenangan tersebut, yaitu perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan, pengesahan program kerja, dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan (Pasal 28).

Berdasarkan Pasal 29, pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

2. Pengurus

Pengurus merupakan organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas (Pasal 31). Pengurus dapat diangkat oleh pembina berdasarkan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Susunan pengurus, yaitu seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.

Pengurus yayasan tidak berwenang mewakili yayasan jika terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dan anggota pengurus yayasan, atau dalam hal pengurus memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan (Pasal 36).

Jika pengurus dinilai oleh pembina telah lalai sehingga merugikan yayasan, pengurus dapat diberhentikan sebelum waktunya (Pasal 32).

3. Pengawas

Pengawas merupakan organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya satu orang (Pasal 40). Pengawas dapat diberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya.

Tanggung jawab pengurus dan pengawas berdasarkan kesalahan, baik karena kelalaian atau kesengajaan sehingga yayasan mengalami kerugian. Jika terbukti pengurus lalai sehingga yayasan mengalami kerugian, pengurus bertanggung jawab renteng (Pasal 39). Namun, jika terjadi kepailitan yayasan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengawas, pengawas bertanggung jawab renteng terhadap kerugian yayasan tersebut.

Yayasan dapat bergabung dengan yayasan lain. Penggabungan ini harus memerhatikan ketidakmampuan yayasan, yayasannya harus sejenis, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Usul penggabungan yayasan harus disampaikan pengurus kepada pembina jika $\frac{3}{4}$ hadir dan $\frac{3}{4}$ -nya dari yang hadir telah setuju. Setelah disetujui oleh setiap pembina yayasan, dibuatlah akta penggabungan yayasan.

Pembubaran yayasan diatur dalam Pasal 62. Berikut ini sebab-sebab bubarnya sebuah yayasan.

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan berakhir.
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
3. Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan:
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. Tidak mampu membayar utang yayasan setelah dinyatakan pailit, atau;
 - c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utang yayasan setelah pernyataan pailit dicabut.

Setelah yayasan bubar harus dilikuidasi. Jika masih ada sisa harta yayasan, berdasarkan Pasal 68, yayasan harus:

- a. Diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan;
- b. Diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan;
- c. Jika tidak diserahkan ke yayasan lain atau kepada badan hukum lain, sisa harta dikembalikan kepada negara dan penggunaannya disesuaikan dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

Bentuk usaha ini cocok untuk usaha yang tidak profit, nirlaba, atau tidak mencari keuntungan dan semata-mata digunakan sebagai wadah bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan sosial.



Bab IV

Teknis Mendirikan Perusahaan

A. Perusahaan Dagang

Proses pendirian perusahaan dagang tidaklah serumit perusahaan persekutuan lainnya. Seseorang yang ingin mendirikan perusahaan dagang dapat mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian perusahaan.

Contoh konkretnya adalah Ida Leman ingin mendirikan butik. Nama butiknya adalah Ida Leman *Collection*. Untuk mewujudkan keinginannya, Ida Leman mendatangi seorang notaris guna membuat akta pendirian perusahaannya. Setelah akta pendirian perusahaan dibuat, maka mulailah Ida Leman menjalankan usaha butiknya.

B. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Pendirian persekutuan perdata dilakukan dengan membuat perjanjian, selain harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang membuat perjanjian harus cakap, memiliki objek tertentu, dan adanya *causa* yang halal. Syarat-syarat lain tersebut yakni tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum, dan keuntungan yang dikejar harus merupakan kepentingan bersama (R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1992:18).

Misalnya, Andi dan Ihsan ingin mendirikan persekutuan perdata. Setelah menentukan nama persekutuan perdata dan jenis usaha persekutuan perdata, maka mereka membuat perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata. Agar lebih kuat, sebaiknya perjanjian pendirian persekutuan perdata dilakukan di hadapan notaris.

C. Firma

Pendirian firma menurut Pasal 16 KUHD Pasal 1618 KUHPerdata tidak disyaratkan adanya akta. Namun, Pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian firma dengan akta autentik, dalam hal ini akta notaris.

Keharusan tersebut tidak disertai dengan sanksi. Malah kalimat berikutnya menyatakan bahwa ketiadaan akta autentik itu tidak boleh dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Dalam praktik pendirian firma selalu dengan akta autentik. Sesudah akta pendirian dibuat di hadapan notaris, akta tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 23 KUHD) dan terakhir akta pendirian tersebut diumumkan dalam berita negara (Pasal 28 KUHD).

Kewajiban pendaftaran dan pengumuman memiliki sanksi, jika tidak dilakukan karena selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka persekutuan firma itu sebagai persekutuan umum, yaitu persekutuan firma yang menjalankan segala macam urusan, didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma itu (Pasal 29 KUHD).

Pada praktiknya, pendirian sebuah firma dilakukan dengan mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian firma. Setelah akta pendirian firma diperoleh, kemudian akta pendirian ini didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri tempat Firma menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya, pengumuman pendirian Firma di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Contohnya, Yani Aria, Hadi Suprpto, dan Sudaryat Permana ingin mendirikan sebuah firma hukum. Ketiganya sepakat untuk menggunakan nama bersama Aria, Hadi & Partners. Ketiganya mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian firma. Kemudian, setelah akta pendirian firma selesai dibuat, maka didaftarkanlah akta pendirian firma tersebut di panitera pengadilan negeri tempat firma hukum tersebut berdomisili. Misalnya, firma tersebut berdomisili di Kota Bandung maka pendaftaran dilakukan di panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung. Setelah pendaftaran di panitera, dilanjutkan dengan pengumuman pendirian firma di Berita Negara Republik Indonesia.

D. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer (CV) merupakan variasi firma. Oleh karena itu, pendirian CV pun sama dengan pendirian firma, yaitu harus dilakukan melalui tiga tahap berikut.

1. Pembuatan akta pendirian di hadapan notaris.
2. Pendaftaran akta pendirian CV pada panitera pengadilan negeri tempat CV berkedudukan atau berdomisili hukum.
3. Pengumuman pendirian persekutuan pada berita negara.

Contohnya, Ahmad, Ria, dan Ranti berencana mendirikan perusahaan yang berbentuk CV. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Ahmad, Ria, dan Ranti, yaitu membuat akta pendirian CV di hadapan notaris. Pada akta pendirian termuat anggaran dasar. Setelah akta tersebut selesai dibuat oleh notaris, maka akta pendirian CV didaftarkan di panitera pengadilan negeri tempat firma berkedudukan. Misalnya, CV berkedudukan di Kabupaten Bandung maka panitera yang berwenang adalah Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung. Setelah akta didaftarkan, dilanjutkan dengan pengumuman pendirian CV di berita negara Republik Indonesia.

Pada pendirian CV, modal CV dapat dicantumkan dalam anggaran dasar atau tidak. Begitu pun masalah domisili CV, ada yang menentukan bahwa domisilinya secara spesifik. Misalnya, CV didirikan di Jalan Singaperbangsa No.1 Bandung. Namun, ada juga yang menyebutkan agar domisilinya disebutkan secara umumnya saja, misalnya CV ini didirikan di Bandung.

E. Perseroan Terbatas (PT)

Proses pendirian perseroan terbatas berbeda dengan mendirikan perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Pendirian PT dilakukan melalui empat tahap berikut.

1. Pembuatan akta pendirian perseroan di hadapan notaris.
2. Pengesahan pendirian perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Pendaftaran pendirian perseroan di daftar perseroan.
4. Pengumuman pendirian perseroan di tambahan berita negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 Ayat (1)). Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal (Pasal 7 Ayat (7)).

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, tetapi hal itu tidak berlaku dalam rangka peleburan (Pasal 7 Ayat (2) jo (3)). Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 Ayat (4)). Apabila perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Namun, jika jangka waktu tersebut telah terlampaui pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut (Pasal 7 Ayat (5) jo (6)).

Pada praktiknya, sebelum membuat akta pendirian PT di hadapan Notaris, para pendiri PT terlebih dahulu mencari nama PT melalui sistem informasi hukum Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, untuk kemudian didaftarkan nama PT tersebut, apakah ada nama PT yang sama atau tidak. Jika nama PT tersebut tidak sama dengan nama PT yang sudah ada, proses pembuatan akta pendirian di hadapan notaris dilakukan. Namun sebaliknya, jika nama PT tersebut

telah sama dengan nama PT yang telah didirikan sebelumnya, para pendiri diminta untuk mencari nama PT yang baru.

Berikut ini contoh konkret prosedur mendirikan PT. Indra, Andri, dan Noki ingin mendirikan sebuah PT. Mereka bertiga menentukan nama PT yang akan didirikan. Nama tersebut kemudian diinformasikan ke notaris. Notaris akan menelusuri ke sistem informasi hukum, apakah nama PT tersebut telah ada atau tidak. Apabila tidak ada, dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian PT di hadapan Notaris. Setelah itu, para pendiri mengajukan permohonan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Setelah mendapat pengesahan maka mereka harus mendaftarkan pendirian PT di daftar perseroan yang ada di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Setelah didaftarkan, PT tersebut diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

F. Pendirian Koperasi

Prosedur pendirian koperasi, yaitu sebagai berikut.

1. Rapat pembentukan koperasi. Untuk koperasi primer didirikan oleh minimal 20 orang anggota, sedangkan untuk koperasi sekunder didirikan oleh minimal 3 koperasi primer. Hasil kesepakatannya dituangkan dalam berita acara.
2. Pembuatan akta pendirian koperasi di notaris. Dalam akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat hal berikut.
 - a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - d. ketentuan mengenai keanggotaan;
 - e. ketentuan mengenai rapat anggota;
 - f. ketentuan mengenai pengelolaan;
 - g. ketentuan mengenai permodalan;
 - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
 - j. ketentuan mengenai sanksi.

3. Pengajuan permohonan pendirian koperasi kepada Menteri Koperasi.
4. Pengesahan akta pendirian koperasi
Pengesahan dilakukan oleh Menteri Koperasi. Teknisnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permohonan kepada Menteri Koperasi agar koperasi mendapat pengesahan sehingga status badan hukum koperasi dapat diperoleh.
5. Pengumuman pendirian koperasi di berita Negara Republik Indonesia.

Berikut ini contoh konkret tahapan pendirian Koperasi. Sekelompok masyarakat di Desa Sindang Kasih yang berjumlah 20 orang sepakat untuk mendirikan koperasi primer dengan nama Koperasi Mekar Jaya. Setelah mengadakan rapat pembentukan koperasi, maka disepakatilah dalam risalah rapat pembentukan koperasi dengan nama Koperasi Mekar Jaya. Dua puluh orang anggota atau mewakilkannya kepada 5 atau lebih orang untuk menghadap kepada notaris agar koperasi didirikan. Setelah itu, mereka harus mengesahkan pendirian koperasi melalui Menteri Koperasi. Setelah disahkan, dilanjutkan dengan pengumuman pendirian koperasi Mekar Jaya di berita negara Republik Indonesia.

G. Yayasan

Prosedur mendirikan yayasan adalah sebagai berikut.

1. Para pendiri yayasan melakukan rapat pembentukan yayasan
Pada rapat tersebut ditentukan nama yayasan, bidang kegiatan yayasan, modal yayasan, tempat kedudukan yayasan, organ yayasan, seperti pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, serta hal-hal lain yang diperlukan oleh yayasan. Pengurus yayasan terdiri atas ketua yayasan, wakil ketua yayasan, sekretaris yayasan, dan bendahara yayasan.

2. Pembuatan akta pendirian yayasan di notaris (Pasal 9)
Pada akta pendirian termuat anggaran dasar yayasan, yang isinya berdasarkan rapat pembentukan yayasan. Pembuatan akta pendirian yayasan dapat dilakukan di semua kantor notaris dan tidak dibatasi dengan wilayah kota atau kabupaten.
3. Permohonan pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 12)
Akta pendirian yayasan dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Tentu saja para pendiri yayasan membuat dan mengajukan permohonan pengesahan yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman.
4. Pengumuman pendirian yayasan di tambahan berita negara (Pasal 24)
Pengumuman penting sekali dalam pendirian yayasan. Dengan pengumuman maka keberadaan yayasan diketahui oleh masyarakat.

Berikut contoh konkretnya. Andini, Citra, Putra, Putri, dan Neha ingin mendirikan yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, yaitu mendirikan yayasan panti jompo Tawakal. Pada rapat pembentukan disepakati bahwa Andini bertindak sebagai pembina yayasan. Adapun Citra, Putra, dan Puteri sebagai bertindak pengurus yayasan yang terdiri atas Citra sebagai Ketua, Putra sebagai Bendahara, dan Puteri sebagai Sekretaris, sedangkan Neha bertindak sebagai Pengawas.

Kelima pendiri yayasan tersebut mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian yayasan. Kurang lebih dua minggu akta pendirian yayasan telah selesai dilakukan. Kemudian, akta pendirian tersebut dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Setelah mendapat pengesahan maka yayasan resmi berstatus badan hukum. Selanjutnya, para pendiri mengumumkan pendirian yayasan Panti Jompo Tawakal pada tambahan berita negara Republik Indonesia.



Bab V

Pengesahan Pendirian Perusahaan

Berikut ini proses mengesahkan pendirian perusahaan dalam arti mengurus perizinan perusahaan dari mulai pembuatan akta pendirian perusahaan, izin tetangga, keterangan domisili perusahaan, pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Tempat Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan wajib daftar perusahaan.

1. Akta Pendirian Perusahaan

Akta pendirian perusahaan merupakan akta notariil atau akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris. Di dalam akta pendirian memuat Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu seperangkat aturan yang memuat dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perusahaan menurut hukum.

Akta pendirian perusahaan bukanlah badan hukum. Oleh karena itu, tidak perlu mendapat pengesahan dari pejabat berwenang, seperti Menteri Kehakiman atau menteri lain sesuai dengan ketentuan undang-undang, cukup didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri tempat perusahaan berkedudukan hukum, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Lain lagi dengan akta pendirian perusahaan badan hukum. Akta pendiriannya harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kehakiman atau menteri lain sebagaimana ditunjuk oleh undang-undang. Momen pengesahan merupakan titik awal status badan hukum perusahaan tersebut. Setelah didaftarkan, perseroan kemudian diumumkan di berita negara Republik Indonesia atau tambahan berita negara Republik Indonesia.

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar perusahaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang disaksikan oleh pejabat umum, dalam hal ini notaris bahwa perjanjian itu memang benar seperti dikehendaki oleh para pihak (para pendiri). Pembeneran itu dibuktikan dengan ikut sertanya notaris selaku pejabat umum membubuhkan tanda tangan pada akta yang dibuat dengan perantaraannya itu.

Apabila yang didirikan adalah perusahaan perseorangan, akta pendirian merupakan bukti resmi bahwa pengusaha perseorangan itu benar mendirikan perusahaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagai gambaran, berikut disajikan contoh akta pendirian sebuah perusahaan komanditer dan akta pendirian perusahaan terbatas.

a. Contoh akta pendirian perusahaan komanditer

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV.

Nomor : -

- Pada hari ini, ... tanggal ... tahun ... pukul ... -----
- Menghadap kepada saya, ... berdasarkan Surat Keputusan -----
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tanggal ... tahun dua ribu (...) Nomor : ..., diangkat sebagai ... -----
di Bandung, berkedudukan ..., dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan ...

2. Tuan .

3. Nyonya .

- Semuanya warga negara Indonesia ; -----
- Semuanya pada saat pendatanganan akta ini sedang berada -----
di kota Bandung; -----
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap menerangkan bahwa para penghadap dengan ini -----
mendirikan Perseroan Komanditer dengan beranggaran -----
dasar (ketentuan-ketentuan) sebagai berikut : -----

Pasal 1 -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Perseroan ini bernama : CV ... -----

untuk pertama kali berkedudukan di ... dengan cabang-cabang, dan/atau -----
perwakilan-perwakilan -----
di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh para -----
pesero pengurus. -----

Pasal 2 -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah : -----

1. Melakukan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang --- hukum dan pajak, yaitu antara lain : -----
 - a. Jasa di bidang konsultasi manajemen, administrasi, tenaga kerja, ---- marketing, pemberdayaan sumber daya manusia ; -----
 - b. Periklanan (advertising) ; -----
 - c. Hiburan, promosi, *agency*, dan manajemen, pengelolaan kegiatan --- hiburan serta produksi kaset, *compact disk*, dan lain sebagainya; ----
 - d. Jasa persewaan alat-alat transportasi, persewaan barang-barang ---- rumah tangga, dan lain sebagainya; -----
 - e. Jasa konsultasi arsitek, antara lain kegiatan teknik arsitek, grafik ---- dan interior, design, *lanscape building*, dan lain sebagainya; -----
 - f. Jasa konsultasi teknik *engineering*, antara lain kegiatan rekayasa ---- dan teknik, dan lain sebagainya; -----
 - g. Jasa telekomunikasi untuk instalasi, perawatan, dan perbaikan, ---- termasuk warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet) -- dan penyewaan komputer; -----
 - h. Jasa di bidang jasa teknologi informasi termasuk multimedia, design, dan pemrograman piranti lunak, -- distributor yang berhubungan dengan piranti lunak;
 - i. Jasa di bidang makanan dan minuman (*catering*) serta usaha sejenis lainnya ; -----
 - j. Jasa *cleaning service*. -----
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, antara lain: ----
 - a. Perdagangan *import* dan *eksport*, antar pulau/daerah serta lokal ---- untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi ----- perusahaan lain; -----
 - b. Bertindak sebagai agen, grosir, distributor, suplier, leveransir, ----- waralaba, dan *commision house*; -----
 - c. Distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan, ----- perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri: ----
 - d. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat, ----- yaitu penjualan dan pembelian bangunan bangunan rumah, ----- gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan ---- apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor dan ruangan ---- pertokoan; -----
 - e. Perdagangan komputer, alat elektronika, serta usaha-usaha sejenis lainnya yang berkaitan; -----

- f. Perdagangan alat telekomunikasi dan segala kegiatan usaha yang -- berkaitan; -----
3. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain: -----
 - a. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, ----- pelaksanaan, dan pengawasan; -----
 - b. Bertindak dalam bidang pelaksana penggalian, antara lain ----- penggalian batu-batuan dan pasir (*Galian C*) serta usaha-usaha ---- sejenis lainnya; -----
 - c. Pendorongan pada umumnya (*general contractor*), antara lain ---- pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman termasuk ----- real estat, kawasan industri (*industrial estat*), gedung-gedung ----- apartemen, kondominium, pertokoan, perkantoran, pertamanan, ---- interior, perawatan serta sarana pendukung lainnya; -----
 - d. Fasilitas-fasilitas pembangunan, termasuk mengerjakan ----- pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan ----- areal/pemukinan serta usaha sejenisnya; -----
 - e. Pembangunan gedung dan konstruksi lapangan, jalan, jembatan, ---- pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, ----- demaga, dan usaha sejenisnya lainnya; -----
 - f. Pembangunan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, ----- telekomunikasi, tower, *Air Conditioner* (AC) serta dalam bidang ---- teknik sipil, elektro, mesin, mekanikal elektrik dan lain sebagainya;
 - g. Pembangunan dalam bidang pelaksana tata lingkungan, ----- antara lain bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah, ----- pengeboran air tanah, reboisasi/penghijauan, serta usaha-usaha -- sejenis lainnya; -----
 - h. Penanganan pengelolaan sampah meliputi pengambilan sampah, ---- pembuangan sampah dan pengolahan sampah. -----
4. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan umum, ----- termasuk pertambangan emas, batu bara, pasir, batu kapur dengan ----- kegiatan penggalian, pengolahan dan memasarkan hasil-hasilnya; -----
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, antara lain: -----
 - a. Industri kayu, penggergajian serta usaha-usaha sejenis lainnya; ----
 - b. Industri kendaraan bermotor yang meliputi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, karoseri dengan perlengkapan komponennya; ----
 - c. Industri kaca serta usaha-usaha sejenis lainnya yang berkaitan; ----

- d. Industri plastik dan fibre; -----
 - e. Industri keramik dan tanah liat serta barang-barang yang terbuat dari bahan tanah liat;-----
 - f. Industri meubel (furniture);-----
 - g. Industri mesin-mesin;-----
 - h. Industri tekstil dan pakaian jadi (garmen), usaha menjahit----- (konveksi), pemintalan, pencelupan, perajutan, pertununan, dan penyelesaian serta usaha sejenis lainnya; -----
 - i. Industri *manufacturing* dan fabrikasi yang meliputi pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi,----- bahan jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan ----- usaha terkait;-----
 - j. Industri *sparepart* kendaraan bermotor dan peralatan lainnya untuk keperluan perbengkelan kendaraan bermotor serta kegiatan ----- usaha terkait;-----
6. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan umum----- (transportasi) untuk penumpang dan barang dengan menggunakan bis, truck, sedan, taksi serta angkutan ----- darat lainnya yang diperkenankan oleh yang berwenang; -----
 7. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan pada umumnya,----- yang meliputi kegiatan perawatan, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, suku cadang (*sparepart*) dan penelitian kualitas berbagai merk AC serta usaha-usaha sejenis lainnya; -----
 8. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, foto copy, ----- penjiilidan, penerbitan, design dan cetak grafis, offset, kartonasp, surat kabar, majalah, tabloid, dan serta berdagang alat-alat tulis----- kantor dan mesin percetakan; -----
 9. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian meliputi tanaman ----- pangan, sayuran, perkebunan kopi, kelapa sawit, karet, coklat, ----- kapas, teh dan tembakau; -----
 10. Menjalankan usaha-usaha di bidang periklanan meliputi:----- sungai, kolam, tambak, dan laut; -----
 11. Menjalankan usaha-usaha di bidang peternakan meliputi: sapi, ----- kambing/domba, ayam, itik dan bebek; -----

12. Teknik penyehatan, penjernihan, teknik sipil basah maupun kering;-----
 13. Menjalankan usaha-usaha di bidang pendidikan, baik formal----- maupun nonformal;-----
- Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan----- tidak mengurangi izin dari instansi-instansi yang berwenang ----- bila diperlukan.

----- PASAL 3 -----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya----- dan dimulai pada saat penandatanganan akta ini-----

----- PASAL 4 -----

----- MODAL -----

1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ----- ternyata dari buku-buku perseroan, juga bagian masing-masing----- dalam modal perseroan. -----
2. Para pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan pada ----- perhitungan (rekening) modal mereka masing-masing untuk ----- penyeteroran-penyeteroran uang dan/atau nilai pemasukan ----- (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan ----- oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan ----- suatu tanda pembayaran (kuitansi) yang sah sebagai tanda bukti----- yang ditandatangani oleh pesero pengurus. -----
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam ----- buku-buku itu, pesero pengurus juga akan mencurahkan tenaga,----- pikiran, dan keahlian masing-masing untuk kepentingan dan ----- kemajuan perseroan. -----
4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, ----- masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam ----- perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah ----- dimasukkan masing-masing ke dalam perseroan. -----

----- PASAL 5 -----

----- PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERO PENGURUS -----

1. Perseroan ini dipimpin, diusahakan, dan diwakili oleh dan ----- atas kebijaksanaan-----

2. (dua) orang pesero pengurus yaitu penghadap Tuan ... dan Tuan ... yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) perseroan, sedangkan untuk pesero diam 1 (satu) orang Komanditer adalah Penghadap Nyonya ... tersebut di atas.
2. Yang mewakili perseroan terhadap pihak luaran, ialah Penghadap Tuan ... tersebut dengan jawaban sebagai DIREKTUR UTAMA dan Tuan ... tersebut dengan jabatan DIREKTUR perseroan.
3. Oleh karena itu, pesero pengurus tersebut dalam jabatannya ia (mereka), baik masing-masing ataupun bersama-sama berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan (penguasaan), menghubungkan perseroan dengan pihak luaran, demikian pula pihak luaran dengan perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan atas nama perseroan dengan ketentuan bahwa untuk:
 - a. memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas benda-benda tetap (tak gerak) kepunyaan perseroan,
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perorangan,
 - c. Mengikat dan atau memberatkan kekayaan perseroan dan;
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin;
4. Para Pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai-pegawai serta menetapkan gaji mereka.

PASAL 6

WEWENANG PESERO (-PESERO) DIAM

1. Pesero-pesero diam secara pribadi atau oleh yang berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung seperti kantor-kantor dan bangunan bangunan lain yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang, dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

2. Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pesero (-pesero) diam (komanditer) itu.

PASAL 7

PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA DAN PAILIT

Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan peseronya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero pengurus maka ia (mereka) wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan pekerjaannya dan membuat laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.

PASAL 8

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero (pesero) yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.
2. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak menunjuk seorang atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk turut melanjutkan usaha-usaha perseroan ini, maka mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.

Pasal 9

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (surseance van betaling) atau dinyatakan di bawah pengampunan (onder curatele gesteld), maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi,

Pasal 10

- bagian pesero yang keluar atau dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayar dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluarnya atau dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan tanda bunga.
- Dengan pembayaran tersebut pesero(-pesero) yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan dengan sisa kekayaan-kekayaan dan beban-beban (*active dan pasiva*)-nya dan dengan tetap memakai nama perseroan.

Pasal 11

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku perseroan harus ditutup dan untuk pertama kalinya dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu enam (2006) harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.
2. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan harus disimpan di kantor perseroan sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh pesero (-pesero) diam dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.
3. Apabila pesero (-pesero) diam tidak dapat menyetujui maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya (mereka) kepada pesero pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu pesero (pesero) diam tidak mengajukan keberatannya (mereka), maka neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus menandatangani, yang berarti bahwa pesero (-pesero) diam memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab (*aquit et decharge*) sepenuhnya kepada (pada) pesero pengurus atas semua tindakan dalam jabatannya itu dalam tahun buku yang lalu.

Pasal 12

KEUNTUNGAN

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pada pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu sebulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 disahkan,

Pasal 13

KERUGIAN

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh pesero yang besarnya sesuai dengan perbandingan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi, maka pesero (-pesero) diam hanya turut bertanggung jawab sampai dengan modal bagiannya dalam perseroan.

Pasal 14

DANA CADANGAN

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditentukan oleh dan atas persetujuan semua pesero.
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk maksud menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian, sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan mana pesero (mereka) perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu.

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian, juga-----
dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan-----
modal kerja perseroan dengan ketentuan bahwa semua keuntungan-----
atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi perseroan. -----

----- Pasal 15 -----

Para pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun-----
mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani-----
bagian mereka dalam perseroan kecuali dengan persetujuan semua-----
pesero lainnya. -----

----- Pasal 16 -----

----- HAL-HAL LAIN -----

- Hal-hal lain yang tidak atau kurang cukup diatur dalam anggaran-----
dasar perseroan menurut akta ini akan diatur dan diterapkan oleh -----
pada pesero bersama-sama. -----
- Tentang pendirian perseroan ini dan segala akibatnya para pesero -----
memilih tempat tinggal hukum yang sah, umum dan tetap pada-----
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung di Bale Endah-----
Kabupaten Bandung. -----

Akta ini diselesaikan pada Pukul

b. Contoh akta pendirian perusahaan terbatas

**DAFTAR STANDAR AKTA PERESORAN TERBATAS
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.....
NOMOR.....**

Pada hari ini,

Hadir di hadapan saya.....¹

Notaris di.....
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut
pada bagian akhir ini.

1. Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Warga Negara
Pekerjaan
Tempat tinggal di.....
Nomor Kartu Tanda Penduduk

2. Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Warga Negara
Pekerjaan
Tempat tinggal di.....
Nomor Kartu Tanda Penduduk

3. Nama Badan Hukum.....
Tempat kedudukan
Alamat lengkap
Nomor dan tanggal pengesahan badan hukum.....

(" Lihat ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan dan
penjelasannya)

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.....

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri.....
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan,
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini.....
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai
berikut:.....

¹ Ditambahkan gelar akademis

NAMA TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT"²
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di³
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.⁴

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.....⁵

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah.....⁶
2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut⁷
 - a.
 - b.
 - c.

² Pemakaian nama Perseroan sesuai dengan nama yang telah disetujui Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ Tempat kedudukan perseroan harus ditulis nama atau kabupaten, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Jika diperlukan persetujuan dari organ perseroan lain, ditambah "dengan persetujuan dari..." (harap dipilih Dewan Komisaris atau RUPS).

⁵ Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, harus disebutkan dengan jelas berapa tahun, misalnya Perseroan didirikan untuk jangka waktu 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

⁶ Maksud dan tujuan tidak boleh bertentangan dengan nama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 serta Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007.

⁷ Kegiatan usaha yang dicantumkan tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan, nama perseroan dan harus memperhatikan ketentuan dalam Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 serta Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007.

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.....⁸

terbagi atas.....saham⁹ masing-masing saham bernilai nominal Rp

2. Dari jumlah dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor % atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁰

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proposional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.¹¹

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

⁸ Besarnya modal dasar perseroan tidak boleh kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan ketentuan jumlah modal minimal untuk Perseroan dengan kegiatan usaha tertentu.

⁹ Jika terdapat saham dengan klasifikasi atau nilai nominal yang berbeda agar disebutkan perbedaannya dengan menggunakan penyebutan seri A, B, dan seterusnya.

¹⁰ Tidak perlu dicantumkan apabila modal sudah dikeluarkan seluruhnya.

¹¹ Ketentuan ini berlaku dalam hal perseroan hanya mempunyai satu klasifikasi saham atau dalam hal perseroan mempunyai lebih dari satu saham, dan saham yang akan dikeluarkan adalah saham dengan klasifikasi yang belum pernah dikeluarkan. Jika saham akan dikeluarkan dengan klasifikasi yang sudah pernah dikeluarkan maka yang mempunyai hak terlebih dahulu hanyalah pemegang saham dengan klasifikasi yang sama.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.¹²
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan Hukum Indonesia.¹³
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.¹⁴
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seseorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham
 - b. nomor surat saham
 - c. nilai nominal saham
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham
 - b. nomor surat kolektif saham
 - c. nilai nominal saham
 - d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh.....¹⁵

PENGANTIAN SURAT SAHAM PASAL 6

1. Jika surat rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

¹² Jika perseroan mempunyai lebih dari satu klasifikasi saham agar diatur mengenal masing-masing klasifikasi saham beserta hak yang melekat pada masing-masing klasifikasi tersebut.

¹³ Ketentuan ayat ini tidak berlaku bagi perseroan dalam rangka penanaman modal asing dan Perseroan Terbuka. Kepemilikan saham dalam ketentuan ayat ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam undang-undang perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁴ Surat keterangan atau catatan tersebut antara lain berbentuk resepis, catatan atau kutipan dari buku daftar saham, akta notarsi mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham.

¹⁵ Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan) dan dapat ditambah persyaratan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya dengan keputusan rapat dewan Komisaris.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis bagi pengeluaran kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.¹⁶

¹⁶ Alternatif lain:

- a. Jika Perseroan mempunyai lebih dari satu klasifikasi saham, ketentuan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain klasifikasi saham yang sama, dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut”.
- b. Jika anggaran dasar persyaratan adanya keharusan untuk memperoleh persetujuan organ Perseroan (pilih salah satu organ Perseroan: RUPS/Dewan Komisaris/Direksi ketentuan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan...(pilih salah satu organ Perseroan:RUPS/Dewan Komisaris)”. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis (pilih salah satu organ Perseroan: RUPS/Dewan Komisaris) melalui Direksi.
- c. Jika anggaran dasar mensyaratkan adanya keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu saham yang hendak dipindahkan haknya kepada pemegang saham lainnya serta keharusan untuk memperoleh persetujuan organ Perseroan (Pilih salah satu organ Perseroan: RUPS/Dewan Komisaris/Direksi), ketentuan ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh...(pilih salah satu organ Perseroan: RUPS/Dewan Komisaris/Direksi).
- d. Jika anggaran dasar tidak mensyaratkan adanya pembatasan pemindahan hak atas saham, ketentuan ayat (2) tidak diperlukan.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan, atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT PEMEGANG SAHAM PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan.
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan pengguna laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS PASAL 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.¹⁷
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

¹⁷ Anggaran dasar dapat pula menentukan "RUPS" diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan" Dalam hal tersebut harus disebutkan letak tempat kegiatan usaha utama itu.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan¹⁸ dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama¹⁹ Selain itu, sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu).
5. Jika Direktur Utama²⁰ tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama.²¹
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS PASAL 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.²²
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.²³

¹⁸ Dalam Anggaran Dasar dapat ditentukan jangka waktu panggilan yang lebih dari 14 (empat belas) hari.

¹⁹ Lihat *Footnote* 25.

²⁰ Lihat *Footnote* 25.

²¹ Apabila ada jabatan Wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur.

²² Antara lain seperti yang termuat dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dalam Anggaran Dasar ketentuan kuorum dapat diatur lebih besar dari yang ditetapkan undang-undang.

²³ Antara lain seperti yang termuat dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dalam Anggaran Dasar ketentuan persyaratan pengambilan keputusan dapat diatur lebih besar dari yang ditetapkan Undang-Undang.

DIREKSI PASAL 11

1. Perseorangan diurus dari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari... anggota direksi.²⁴
2. Jika diangkat lebih dari seseorang direktur maka seseorang di antaranya dapat diangkat sebagai²⁵
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktutahun²⁶ dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi kekosongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6)
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 12

1. Direksi berhak memawikili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri haru dengan persetujuan Dewan Komisaris.²⁷

²⁴ Harap diisi berapa jumlahnya.

²⁵ Nama jabatan "Direktur Utama" adalah suatu alternatif dapat digunakan nama jabatan lain misalnya, "Presiden Direktur" atau hanya menyebutkan "Direktur I".

²⁶ Sebutkan jangka waktu misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun.

²⁷ Persetujuan tersebut dapat pula disyaratkan harus diberikan oleh RUPS dan bentuk perbuatan bukan yang memerlukan persetujuan tersebut dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perseroan. Jika tidak diperlukan persetujuan dari organ lain, kalimat "akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk.....dst." tidak perlu dirumuskan.

2. a. Direktru Utama²⁸
 - b. Dalam hal Direktur Utama²⁹ tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.³⁰

RAPAT DIREKSI PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seseorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 11 (per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.³¹
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama³² dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seseorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.³³

²⁸ Lihat footnote 25 tentang nama jabatan Direksi.

²⁹ Lihat footnote 25

³⁰ Ketentuan dalam huruf b ini adalah suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif lain: misalnya, "Dalam hal Direktur Utama. (lihat footnote 25) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan" atau alternatif lain sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

³¹ Jika Perseroan ingin menentukan jumlah yang lebih kecil daripada 1/10 (satu per sepuluh), maka jumlah tersebut wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar, tetapi sesuai dengan ketentuan undang-undang, Perseroan tidak boleh menentukan dalam anggaran dasar jumlah minimal lebih besar dari 1/10 (satu per sepuluh).

³² Lihat Footnote 25.

³³ Ketentuan ini adalah suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif lain: misalnya, Anggaran Dasar dapat menentukan rapat Direksi dipimpin oleh "wakil Direktur Utama", atau kemungkinan lain oleh "Direktur yang usianya tertua".

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.³⁴
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.³⁵
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.³⁶
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS PASAL 14

1. Dewan komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang atau lebih anggota Dewan komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai komisaris Utama.³⁷
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang Saham untuk jangka waktu.... tahun³⁸ dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

³⁴ Ketentuan ini adalah, suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif lain: misalnya, "apabila dalam rapat hadir atau diwakili oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi."

³⁵ Ketentuan ini adalah suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif lain: misalnya, "apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi."

³⁶ Ketentuan ini adalah suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif lain: misalnya, "apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan sebagai ditolak"

³⁷ Nama jabatan "Komisaris Utama" adalah suatu alternatif dapat digunakan nama jabatan lain misalnya, "Presiden Komisaris" atau hanya menyebutkan "Komisaris I".

³⁸ Sebutkan jangka waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada komisaris utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan komisaris³⁹ untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat hari⁴⁰ sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

³⁹ Bagi Perseroan Persero kepada RUPS sesuai dengan peraturan perundangan

⁴⁰ Agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perseroan

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. pada akhir bulan Desember. tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember⁴¹
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimaksudkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan⁴² sejumlah saham atau seluruhnya dengan nilai nominal RP.... yaitu oleh para pendiri:

⁴¹ Ketentuan pada ayat ini adalah merupakan alternatif, dapat juga ditentukan alternatif lain, misalnya "tahun buku dimulai tanggal 1 (satu) April dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berikutnya".

⁴² Jika disetor dalam bentuk lain, harus disebutkan dengan jelas perincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya.

- Tuan
tersebut, sejumlahsaham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp

- PT.....
tersebut sejumlah saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.....

- sehingga seluruhnya berjumlah saham
- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.....

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 0 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan komisaris, telah diangkat sebagai:

- Direktur utama : Tuan
lahir di
pada tanggal
swasta, warga negara Indonesia, bertempat
tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

- Direktur : tuan
lahir di

pada tanggal
swasta, warga negara Indonesia,
bertempat
tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
....

- Komisaris Utama : tuan
lahir di
pada tanggal
swasta, warga negara Indonesia,
bertempat tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

- Komisaris : tuan
lahir di
pada tanggal
swasta, warga negara Indonesia,
bertempat tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
....

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

.....**DEMIKIANLAH AKTA INI**.....

Dibuat dan diresmikan di..... pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh

Keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di..... dan di..... sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.....

2. Keterangan Domisili Perusahaan

Pengurusan domisili perusahaan dimulai dari pembuatan akta pendirian perusahaan. Akta pendirian ditunjukkan kepada tetangga di lingkungan perusahaan yang kita dirikan. Dua tetangga kanan dan dua tetangga kiri sudah cukup untuk pengurusan domisili perusahaan.

Apabila tetangga mengizinkan, tetangga membubuhkan tanda tangan di formulir persetujuan tetangga. Setelah mendapat tanda tangan dari tetangga, dilanjutkan dengan memberi tahu maksud dan tujuan mendirikan perusahaan ke RT dan RW setempat. RT dan RW harus membubuhkan tanda tangan dan cap sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan dari RT serta RW setempat.

Selanjutnya, persetujuan tetangga tersebut dibawa ke kelurahan atau desa di sekitar perusahaan yang kita dirikan. Atas dasar persetujuan tetangga maka kepala desa atau kepala kelurahan memberikan keterangan domisili yang diketahui oleh camat di sekitar perusahaan yang kita dirikan.

Berikut contoh persetujuan tetangga.

PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para tetangga dari Bangunan/Rumah yang terletak di alamat : Jalan Kelurahan Kecamatan Bandung. Menyatakan bahwa tidak keberatan dan menyetujui Bangunan/Rumah yang terletak di alamat tersebut di atas dipergunakan untuk:

Kegiatan Usaha :
Nama Perusahaan :
Nama Pemilik/Pimpinan :
Dengan syarat :

1. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan
2. Tidak melanggar ketentuan dan peraturan Pemerintah Daerah setempat

No.	N a m a	A l a m a t	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			

Bandung,

Mengetahui


Ketua RT

Ketua RW

(.....)

(.....)

Berikut contoh keterangan domisili perusahaan.


PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN :
KELURAHAN :

No. Model XVI

SURAT KETERANGAN DOMICILI PERUSAHAAN

Nomor :

Lurah bersama ini menerangkan bahwa:

Nama :

No. KTP :

Tempat & Tanggal lahir (umur) :

A g a m a :

Kewarganegaraan :

Alamat rumah & telepon :

Jabatan :

Benar mempunyai perusahaan yang berdomisili dalam wilayah Kelurahan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor :

Telepon Kantor :

Akte Pendirian : Notaris :

No. tanggal :

Bergerak dalam bidang :

Jumlah pegawai :

Jam kerja :

Surat Keterangan ini diklasifikasikan kepada yang bersangkutan untuk keperluan pengurusan Izin Tempat Usaha.

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Tanggal : Bandung,

Nomor : Lurah :

Mengetahui :

Camat : (.....)
NIP.


(.....)
NIP.

3. NPWP

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan identitas dari wajib pajak. Syarat mengurus NPWP adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi keterangan domisili perusahaan, dan surat kuasa jika yang mengurus NPWP adalah orang lain serta mengisi formulir permohonan NPWP. Pengurusan NPWP tidak dipungut biaya. Jangka waktu pengurusan NPWP adalah satu hari kerja di Kantor Pelayanan Pajak.

Pengurusan NPWP dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili perusahaan. Pengurusan NPWP sekarang dapat dilakukan secara online atau manual di Kantor Pelayanan Pajak. Apabila direksi belum mempunyai NPWP sendiri, sebelum membuat NPWP perusahaan atau badan, perlu dibuat dahulu NPWP direksi.

Berikut contoh NPWP.


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIGUGAS

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-1251/WPJ.09/KP.0303/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : LIGAR HARYANA YUGAMIBAWA

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 24.377.317.3-429.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 95004 - PEKERJA SWASTA

4. Alamat : KUMP SIMPAY ASIH JL MAYANG LIGAR NO 16 RT/RW :003/005 PASIR ENDAH - UJUNG BERUNG BANDUNG - 40619

5. Merk/Akronim : SWASTA

6. Status Model : UP tidak melakukan pekerjaan bebas

7. Status Usaha : [] PPh Pasal 4(2) [] PPh Pasal 23

8. Kewajiban Pajak : [] PPh Pasal 15 [] PPh Pasal 25

[] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26

[] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29

[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 01-04-2008

BANDUNG, 01 April 2008

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cigugas

MURAHMATT SULISTYAHINGSIH
NIP. 060080696

(Stempel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cigugas)

Register : 2736944291
KP.PDIP.4.2-00

REPUBLIK INDONESIA

NPWP : 24.377.317.3-429.000

NAMA : LIGAR HARYANA YUGAWIRAWA

ALAMAT: KUPP SIMPAW AGIH JL MAYANG LIGAR NO 16
RT.003 RW.005 PASIR ENDAH
KUDUNG BERUNG
KUDUNG

TERDAFTAR
01-04-2008

PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melepaskan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO

Surat Izin Tempat Usaha atau disingkat SITU. Syarat-syarat untuk pengurusan SITU adalah fotokopi KTP dan kartu keluarga atau paspor pengurus perusahaan, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi NPWP perusahaan, fotokopi keterangan domisili perusahaan, formulir surat permohonan izin tempat usaha, sertifikat tanah untuk kantor perusahaan atau akta jual beli atau perjanjian sewa-menyewa, izin tetangga di sekitar perusahaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor perusahaan, serta tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

Pengurusan SITU/HO dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu satu pintu (dulu namanya kantor pelayanan satu atap). Jangka waktu pengurusan SITU/HO, yaitu 14 hari kerja.

Berikut ini contoh SITU.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH
 JL. WASTUKANCANA NO. 2 BANDUNG
 TELEPON LANGSUNG 4215574 - 4421042

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

WALIKOTA BANDUNG

Membaca : Surat permohonan tanggal dari
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 untuk memperoleh izin gangguan bagi
 perusahaan
 dengan nama
 terletak di Bandung
 berikut syarat-syarat dan datanya.

- Mengingat :
1. Undang-undang (Hinder Ordonnantie) Stbk. 1926 No. 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir tanggal Stbl. 1940 No. 450 Jo Peraturan Daerah Gangguan Bandung tahun 1928.
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
 5. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1993 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan;
 6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 23 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 8. Keputusan Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 352 Tahun 1999 tanggal 23 Juli 1999 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 23 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 9. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 503 / SK.353. IIag. Huk Tahun 1999 tanggal 22 Juli 1999 tentang Tim Peneliti Izin Gangguan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 10.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Peneliti Tempat Usaha

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Jenis Usaha :

Luas Tanah : M2, Luas Bangunan M2

Ruang Usaha : (.....) M2

dengan ketentuan dan syarat

- I. Pengusaha diwajibkan untuk melengkapi izin-izin lain yang berkaitan dengan jenis/bentuk usahanya dari instansi yang berwenang
- II. Pengusaha/pengurus perusahaan wajib menaati syarat-syarat untuk:

1). KEAMANAN:

1). KEAMANAN:

5. Tanda Daftar Perusahaan atau TDP

Syarat pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yaitu fotokopi KTP dan kartu keluarga atau paspor pengurus, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi keterangan domisili perusahaan, surat izin tempat usaha, dan surat izin usaha perdagangan.

Pengurusan TDP dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu satu pintu (dulu namanya kantor pelayanan satu atap). Jangka waktu pengurusannya, yaitu 14 hari kerja.

Berikut ini contoh TDP.



No. :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN **PERSEROAN TERBATAS**

(BELUM BERBADAN HUKUM)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	
-----------	---------------------	--

NAMA PERUSAHAAN :	
STATUS :	
ALAMAT :	
NOMOR TELEPON :	FAX :
PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK :	
KEGIATAN USAHA POKOK : (KBLI)	

BANDUNG,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BANDUNG

(.....)
 (NIP)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Sekretaris Daerah cq. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kestra
- Lembar 2 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
- Lembar 3 : Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
- Lembar 4 : Dinas Perindag Kota Bandung
- Lembar 5 : Camat

No. :



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

NOMOR :

1. Nama Perusahaan :
2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp. / Fax.
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
No. Telp. / Fax.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Nilai modal dan kekayaan bersih :
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk
Tanah dan Bangunan Tempat Usaha :
8. Kegiatan Usaha :
9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :
.....
.....
.....

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA :** a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan
b. Registrasi/Herregistrasi berlaku 3 (tiga) tahun
- KEDUA :** Pemilik Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA :** Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT :** Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BANDUNG**

Kepala,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah
 cq. Asisten Ekonomi
 Pembangunan dan Kesra
2. Badan Pengawas Daerah
3. Kecamatan

7. Wajib Daftar Perusahaan

Pengurusan Wajib Daftar Perusahaan diperintahkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Syarat-syarat pengurusan wajib daftar perusahaan, yaitu fotokopi KTP dan kartu keluarga pemohon, salinan akta pendirian perusahaan, surat keputusan pengesahan perusahaan bagi perseroan terbatas, fotokopi SITU, fotokopi NPWP, dan SIUP asli.

Tujuan pendaftaran perusahaan adalah sebagai berikut.

- a. Melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktik usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang.
- b. Melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan kerugian akibat perbuatan yang tidak jujur atau *insolvabel* suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan yang sifatnya terbuka untuk semua pihak.
- c. Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan.
- d. Memudahkan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan serta penciptaan iklim usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.

Dengan adanya daftar perusahaan maka buku daftar perusahaan memiliki fungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas perusahaan. Selain itu, buku daftar perusahaan juga berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna bagi pihak ketiga sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Oleh karena itu, pengusaha yang mendaftarkan perusahaannya dituntut mempunyai sifat jujur dan terbuka sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Demikian data yang jujur dan terbuka, diharapkan fungsi dari dokumen perusahaan, baik sebagai sumber informasi maupun sebagai alat bukti yang sempurna tercapai.

Kewajiban pendaftaran berlaku untuk semua perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Perusahaan yang didaftarkan dapat berstatus kantor tunggal, kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, anak perusahaan, kantor agen, dan kantor perwakilan perusahaan. Hal yang dikecualikan dari kewajiban daftar perusahaan adalah usaha kecil yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri, tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, benar-benar hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya, dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik, atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberi surat kuasa yang sah. Jika pemiliknya lebih dari satu orang, pendaftaran dapat dilakukan oleh salah satu pemilik perusahaan. Jika pemiliknya tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang wajib mendaftarkan adalah pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan tersebut.

Apabila pemilik atau pengurus perusahaan dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan perusahaannya, menurut Pasal 32 UUWDP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah. Tindak pidana ini merupakan kejahatan.

8. Merek Perusahaan

Merek merupakan hak kekayaan intelektual perusahaan. Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan dalam perdagangan, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan dalam jasa. Contoh merek dagang adalah **NOKIA**, sedangkan contoh merek jasa adalah **CV TIKI**.

Undang-Undang Merek menganut sistem konstitutif yang artinya perlindungan hukum terhadap merek diberikan karena adanya pendaftaran. Oleh karena itu, penting sekali mengetahui apakah merek tersebut dapat didaftarkan atau tidak. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu sebagai berikut.

1. Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Contohnya, pemohon merek akan mendaftarkan merek dengan tujuan agar usaha pesaingnya bangkrut.
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Contohnya, merek "**NARKOTIK**".
3. Tidak memiliki daya pembeda. Contohnya, merek air mineral kemasan "**AIRKU**".
4. Telah menjadi milik umum. Contohnya, merek "?".
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contohnya, merek "**PENSIL**" (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek).

Suatu merek yang didaftarkan akan ditolak oleh Direktorat Merek apabila merek tersebut sebagai berikut.

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Misalnya, pendaftaran merek.

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak;
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Merek yang telah didaftarkan dapat dihapus pendaftarannya oleh Direktorat Merek apabila sebagai berikut.

1. Merek terdaftar tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek perusahaan harus didaftarkan. Sebelum pendaftaran merek, pastikan merek yang akan didaftarkan memenuhi persyaratan untuk didaftarkan. Dari beberapa variasi desain etiket merek yang dibuat oleh pemohon, ajukan terlebih dahulu penelusuran merek secara resmi supaya diketahui peluang merek yang akan didaftarkan, apakah diterima atau ditolak. Setelah mendapatkan hasil penelusuran resmi dari Direktorat Merek, ajukan pendaftaran merek yang

dimungkinkan untuk didaftarkan, isi permohonan pendaftaran merek, lengkapi pendaftaran merek dengan surat keterangan bahwa merek yang didaftarkan betul-betul merek pemohon, gandakan etiket merek sebanyak 20 eksemplar dengan ukuran minimal 2x2 cm dan ukuran maksimal 9x9 cm, fotokopi KTP pemohon, surat kuasa khusus apabila pemohonnya memberikan kuasa kepada konsultan hak kekayaan intelektual, NPWP pemohon atau NPWP badan apabila pemohonnya perusahaan, akta pendirian perusahaan, dan tanda pembayaran biaya permohonan pendaftaran.

Setelah lengkap, ajukan pendaftaran merek ke Direktorat Merek. Petugas penerima pendaftaran merek akan mencantumkan tanggal, nomor pendaftaran pada formulir pendaftaran yang berjumlah 4 rangkap, dan satu rangkap dikembalikan kepada pemohon.

Pemohonan pendaftaran yang diajukan kemudian akan diperiksa secara administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen pendaftaran merek. Apabila masih ada kekurangan, direktorat merek akan memberitahukan kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangan dokumen pendaftaran merek. Apabila pemeriksaan administratif telah lengkap, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan substantif. Di sini diperiksa secara mendalam berkaitan dengan merek itu sendiri. Apakah merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang, apakah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak yang sudah terdaftar, merek terkenal, indikasi geografis, dan indikasi asal. Jika berdasarkan pemeriksaan substantif tidak ada masalah hukum, dilakukanlah pengumuman pendaftaran merek di daftar pengumuman merek dan hal itu dilakukan selama tiga bulan.

Jangka waktu pengumuman tersebut merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pihak-pihak yang keberatan atas pendaftaran

merek tersebut. Apabila jangka waktu 3 bulan telah terlewati dan tidak ada yang keberatan, dilakukanlah penyertifikatan dan penandatanganan sertifikat merek oleh Direktur Merek.

Biaya pendaftaran merek, yaitu Rp600.000,- per permohonan per kelas pendaftaran untuk tiga jenis barang. Namun, apabila lebih, setiap kelebihanannya ditambah Rp50.000,-. Lamanya proses pendaftaran merek sampai sertifikat merek diterima pemohon biasanya berkisar satu tahun sampai satu setengah tahun.

Jangka waktu perlindungan merek yang sudah terdaftar berlangsung selama 10 tahun, terhitung sejak permohonan pendaftaran merek diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah habis, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu merek terdaftar yang diajukan ke Direktorat Merek dengan prosedur dan syarat-syarat yang hampir sama dengan pengajuan permohonan yang sama, tetapi biaya permohonan perpanjangan lebih mahal.

Sebuah merek sering dipersengketakan. Sengketa merek dapat berupa sengketa perdata atau sengketa pidana merek. Penyelesaian sengketa perdata merek diajukan ke Pengadilan Niaga. Terhadap putusan pengadilan niaga, para pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, apabila putusan kasasi pun masih tidak puas, dapat menempuh upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata, untuk penyelesaian sengketa pidana merek, disyaratkan adanya aduan dari pihak yang dirugikan karena deliknya adalah delik aduan. Tanpa aduan maka proses penyelidikan tidak dapat diteruskan ke proses penuntutan.

Pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindak pidana merek ke kepolisian. Kepolisian sebagai penyidik umum akan mengajukan permohonan keterangan saksi ahli dari Penyidik PPNS di Direktorat Merek. Apabila penyidik PPNS berpendapat bahwa tindak pidana merek tersebut tidak terpenuhi, pihak penyidik umum tidak dapat meneruskan perkara tersebut. Sebaliknya, jika penyidik PPNS memandang ada tindak pidana merek, penyidik umum akan meneruskan perkara tersebut. Penyidik umum biasanya meminta keterangan penyidik PPNS sampai dua kali.

Apabila berkas perkara telah lengkap, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian diproses dan diajukan penuntutan di persidangan yang digelar di pengadilan negeri yang berwenang. Jika tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, perkara dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Kemudian, apabila masih tidak puas, perkara diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pada perkara perdata merek, konsultan hukum perusahaan dapat terlibat dalam pengajuan gugatan merek, pengajuan jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan, pembuktian, pengajuan memori kasasi, pembuatan kontramemori kasasi, pengajuan permohonan peninjauan kembali, dan pengajuan tanggapan terhadap peninjauan kembali.

Pada perkara pidana merek, konsultan hukum perusahaan dapat terlibat dalam pendampingan klien melaporkan tindak pidana merek, mendampingi klien pada tahap penyelidikan, mendampingi klien pada tahap penyidikan, dan mendampingi klien di persidangan.

Berikut contoh-contoh pendaftaran merek perusahaan sampai dengan sertifikat merek perusahaan, termasuk formulir-formulirnya.

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Lembar 1

* Tgl. Masuk :	* Untuk Permintaan Merek :
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permintaan :

Nama, Kewarganegaraan dan alamat
Pemilik Merek :

Nama dan alamat kuasa :

Alamat yang dipilih di Indonesia (diisi untuk pemilik :
merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia).

Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran :
merek yang pertama kali (diisi untuk permintaan
pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas).

Warna-warna etiket :	Etiket
Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :	
Kelas barang/jasa :	
Jenis barang/jasa :	

* Diisi oleh Kantor Merek

Pemilik/kuasa

Tanda tangan :

Nama lengkap :

PERMINTAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR

Lembar 1

* Tgl. Masuk :	* Untuk Perpanjangan Merek :
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permintaan :

Nama, Kewarganegaraan dan alamat
Pemilik Merek :

Nama dan alamat kuasa :

Alamat yang dipilih di Indonesia
(Diisi untuk pemilik merek yang
tidak bertempat tinggal di
Indonesia).

Etiket merek	Warna-warna etiket :
	Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :
	Nama, tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran merek yang dimintakan perpanjangan :
	Kelas barang/jasa :
Jenis barang/jasa :	

* diisi oleh kantor merek

Pemilik/Kuasa

Tanda tangan :

Nama lengkap :

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

* Tgl. Masuk :	* Untuk Permintaan Merek :
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permintaan :

Nama, Kewarganegaraan, dan alamat
Pemilik Merek :

Nama dan alamat Kuasa :

Alamat yang dipilih di Indonesia
(Diisi untuk pemilik merek yang
tidak bertempat tinggal di
Indonesia).

Nama Negara dan tanggal permintaan
pendaftaran merek yang pertama kali
(Diisi untuk permintaan pendaftaran
yang diajukan dengan hak prioritas).

warna-warna etiket :

Etiket merek

Arti bahasa/huruf/angka
asing dalam etiket merek :

Kelas barang/jasa :

Jenis barang/jasa :

* diisi oleh kantor merek

Tgl.

Pemilik/Kuasa

Tanda tangan :

Nama lengkap :

KLASIFIKASI INTERNASIONAL BARANG DAN JASA

Berdasarkan Nice Classification (Eighth Edition)

Diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO)

Tahun 2001

KELAS	JENIS BARANG
1	Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; damar buatan yang belum diproses plastik yang belum diproses; pupuk; komposisi pemadam kebakaran; sediaan-sediaan mengeraskan dan mematri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamak; bahan perekat yang digunakan dalam industri.
2	Cat, pernis, lak; bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; bahan warna; bahan penyerang; damar alam yang belum diolah; logam dalam bentuk daun atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak dan untuk para artis.
3	Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetika, minyak rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi.
4	Minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu.
5	Sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kedokteran; hasil makanan pantang untuk keperluan medis, makanan bayi, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan, bahan pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur; bahan pembasmi rumput liar.
6	Logam kasar serta campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam kasar; barang-barang besi; barang-barang kecil dari besi; pipa logam, peti besi, barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; pelikan (mineral).
7	Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual, alat pengeram.
8	Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); pisau; pedang; pisau cukur.
9	Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, potret, kinematografi, timbang, ukur sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukan uang atau kepingan logam ke dalamnya, kas register, mesin hitung; alat pemroses data dan komputer; pesawat pemadam api.
10	Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan, mata, dan gigi palsu, barang-barang ortopedi; bahan-bahan benang bedah.
11	Instalasi penerangan, pemanasan, penghasil dan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan.
12	Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air.
13	Senjata api, amunisi dan protektif; bahan peledak, kembang api.
14	Logam mulia dan campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau disepuh dengan bahan-bahan itu, tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan; batu berharga, jam dan pesawat pengukur waktu.
15	Alat-alat musik.
16	Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; barang cetakan, alat menjilid buku; potret, alat tulis-menulis; bahan perekat untuk keperluan tulis-menulis atau rumah tangga; alat untuk kesenian, kuas untuk melukis; mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot), alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); kartu main, huruf-huruf cetak; blok-blok cetak.
17	Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang dan bahan-bahan itu dan tidak termasuk dalam kelas lain, plastik dalam bentuk menonjol untuk digunakan dalam manufaktur; bahan-bahan yang dipakai untuk pengemasan, merapatkan dan untuk menyekat; tabung lentur bukan dari logam.
18	Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang dan bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas ini; kulit binatang, kulit halus; koper dan tas, payung hujan payung matahari dan tongkat, cambuk, pakaian kuda dan pelana.



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memberikan Hak Merek kepada :

Nama dan alamat pemilik merek terdaftar :

Nama dan alamat kuasa/Konsultasi HKI :

Tanggal Pendaftaran Merek :

Nama Negara dan tanggal
permohonan pendaftaran merek
(apabila permintaan pendaftaran
merek diajukan dengan menggunakan
hak prioritas).

Kelas Barang/Jasa :

Perlindungan Hak Merek diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Dengan Nomor:, tanggal penerimaan permohonan:
Sertifikat Merek ini dilampirkan dengan etiket merek, jenis barang/jasa yang dilindungi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sertifikat merek ini.

.....
A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Merek

.....
NIP.



(250) MEREK INDONESIA (111)

DIREKTORAT MEREK (151)

(210) Nomor Permohonan Merek :

(220) Tanggal Pengajuan
Permohonan Merek :

(591) Uraian warna :

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing
dalam contoh merek :

(540) Contoh Merek :

(510) Uraian Barang/Jasa :

.....
.....
.....
.....



Bab VI

Membuat Perusahaan Anda Terdaftar di Bursa Saham

Tidak semua perusahaan dapat terdaftar di bursa saham. Perusahaan yang dapat terdaftar di perusahaan haruslah melakukan proses *go public* atau menjual saham kepada publik. Untuk dapat menjual sahamnya kepada publik, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat agar dapat *go public*. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UUPM mengatur mengenai syarat-syarat perusahaan untuk dapat *go public* atau menjadi perusahaan publik. Syarat-syarat tersebut tersirat dalam Pasal 1 Angka 22 UUPM, yaitu saham perseroan sekurang-kurangnya dimiliki 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,-. Disamping itu, masih ada syarat-syarat lain, yaitu bagi perseroan yang berbentuk bank, laporan keuangannya harus mencatatkan laba selama tiga tahun berturut-turut, sedangkan untuk perseroan nonbank, laporan keuangannya harus mencatatkan laba dua tahun berturut-turut. Kemudian, laporan keuangan yang disajikan harus diperiksa atau diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di pasar modal dengan pendapat wajar tanpa syarat.

Go public atau penawaran umum sendiri adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Pelaksanaannya (Pasal 1 Angka 25 UUPM). Emiten sendiri merupakan perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik atau perusahaan yang melakukan emisi saham. Emisi, artinya mengeluarkan saham.

Saham yang dapat dilakukan emisi tentu saham yang sifatnya *portepel*, artinya saham yang belum ditempatkan atau saham yang belum dimiliki oleh pemegang saham. Misalnya saja, modal dasar suatu perseroan terbatas berjumlah Rp500.000.000.000,- yang terdiri atas 500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,-. Dari modal dasar tersebut, baru ditempatkan sebesar 200.000 lembar

saham, berarti ada 300 lembar saham yang belum ditempatkan dan sewaktu-waktu dapat dilakukan emisi saham.

Berikut ini instrumen-instrumen pasar modal.

1. Saham

Saham merupakan bagian dari modal perseroan terbatas yang diambil bagian oleh para pemegang saham atau para persero. Saham dimaknai juga dengan bukti kepemilikan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Pengertian-pengertian tersebut sesuai dengan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

2. Obligasi

Obligasi adalah bukti utang emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK/013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991).

Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan nilai nominal (nilai *pari/par value*) dan waktu jatuh tempo tertentu diterbitkan oleh suatu lembaga. Penerbit obligasi dapat berupa perusahaan swasta maupun BUMN dan juga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal adalah obligasi kupon (*coupon bond*) dengan tingkat bunga tetap (*fixed*) selama masa berlaku obligasi. Bunga obligasi bersifat tetap secara berkala setiap tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sekali sampai waktu

jatuh tempo. Ketika obligasi tersebut jatuh tempo maka penerbit harus membayar sesuai dengan nilai pari dari obligasi beserta bunga/kupon dari obligasi tersebut.

Obligasi biasanya diperjualbelikan dalam satuan 1 miliar rupiah. Masa berlakunya obligasi sangat bergantung dengan badan yang menerbitkan yang paling umum adalah 5 tahun. Sebagai alternatif investasi, obligasi memiliki beberapa risiko, yaitu (1) risiko tingkat suku bunga yang sangat dipengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Jika tingkat suku bunga meningkat, harga obligasi akan menurun, begitu pun sebaliknya; (2) risiko gagal bayar (*default risk*), penerbit dapat saja kesulitan keuangan dan tidak menepati janjinya untuk membayar kupon atau bunga obligasi setiap tahun atau pokok dari investasi; (3) risiko pembelian kembali (*call risk*), yaitu perusahaan penerbit memiliki hak untuk membeli kembali (*buy back*) obligasi pada harga tertentu (*call price*), sebelum obligasi jatuh tempo; (4) risiko nilai tukar mata uang (*exchange rate risk*) apalagi akan dikeluarkan atau dicatatnya obligasi dalam mata uang nonrupiah di pasar modal yang nantinya akan memengaruhi pendatan dari bunga obligasi akibat perubahan nilai tukar; (5) risiko likuiditas, yaitu risiko kesulitan menjual obligasi pada harga tertentu apabila tiba-tiba membutuhkan dana jangka pendek; (6) risiko inflasi, ketika nilai arus kas yang diterima dari kupon regular setiap tahun dapat digerogeti dengan tingginya angka inflasi.

3. **Bukti Rights**

Bukti Rights adalah suatu produk efek yang diturunkan dari saham yang dikeluarkan oleh emiten yang memberi hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten dengan proporsi dan harga tertentu.

4. **Waran**

Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut dengan harga tertentu setelah 6 bulan.

5. **Opsi**

Opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

6. **Convertible Bond**

Convertible bond (obligasi konversi) merupakan suatu jenis obligasi yang di samping memberikan bunga juga memberikan hak opsi kepada pemegangnya untuk menukar pokok pinjaman obligasi dengan saham atau *equity* dari emiten atau perusahaan penerbitnya dengan harga tertentu (rasio konversi tertentu) dan pada saat tertentu (A. Setiadi, 1996:34).

7. **Efek Beragun Aset**

Efek beragun aset merupakan tipe sekuritas (efek) yang di-*back up* oleh jaminan dalam bentuk aset-aset finansial. Apabila yang dijamin itu berupa tanah (hak tanggungan), jenis efek ini bernama *Mortgage Backed Securities* (Munir Fuady, 1999:39).

Menurut Peraturan Bapepam No. IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek Beragun Aset adalah unit penyertaan kontrak investasi kolektif dengan mana portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah dan apartemen, efek yang dijamin oleh pemerintah, sarana

peningkatan kredit, dan keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Efek beragun aset bukanlah reksadana.

Pembentukan efek beragun aset dilakukan melalui proses sekuritisasi, yaitu suatu proses disintermediasi ketika kredit-kredit dari bank-bank komersial dan pemberi pinjaman lainnya diganti dengan sekuritas hutang yang *marketable* yang dapat diterbitkan dengan biaya yang rendah. Dalam proses sekuritisasi terbentuk suatu *pool* terhadap aset-aset *financial* sehingga sekuritas utang tersebut dapat dijual kepada pihak investor luar untuk membiayai *pool* tersebut (Francis Jack Clark, 1991:46).

Proses sekuritisasi aset dilakukan suatu transformasi dari aset-aset keuangan yang tidak dapat segera diubah menjadi dana yang likuid. Transformasi tersebut dilakukan dengan cara menerbitkan efek yang dapat dijual kepada pihak investor dengan dijamin oleh aset finansial yang bersangkutan.

8. Indeks Saham

Indeks Harga Saham Gabungan (disingkat **IHSG**, dalam bahasa Inggris disebut juga *Jakarta Composite Index*, JCI, atau *JSX Composite*) merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI; dahulu Bursa Efek Jakarta (BEJ)). Indeks Harga Saham Gabungan Diperkenalkan kali pertama pada 1 April 1983, sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham *preferen* yang tercatat di BEI. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham.

Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat (kecuali untuk

perusahaan yang berada dalam program restrukturisasi) dengan harga di BEJ pada hari tersebut.

Perhitungan indeks merepresentasikan pergerakan harga saham di pasar/bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan disesuaikan secara cepat apabila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat faktor lain yang tidak terkait dengan harga saham. Penyesuaian akan dilakukan apabila ada tambahan emiten baru, HMETD (*right issue*), *partial/company listing*, waran, dan obligasi konversi, demikian juga dengan *delisting*. Jika terjadi *stock split*, dividen saham atau saham bonus, nilai dasar tidak disesuaikan karena nilai pasar tidak terpengaruh. Harga saham yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga saham di pasar reguler yang didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan sistem lelang.

Perhitungan IHSG dilakukan setiap hari, yaitu setelah penutupan perdagangan setiap harinya. Dalam waktu dekat, diharapkan perhitungan IHSG dapat dilakukan beberapa kali atau bahkan dalam beberapa menit. Hal ini dapat dilakukan setelah sistem perdagangan otomatis diimplementasikan dengan baik.

Prosedur atau proses *go public* biasanya dilakukan dalam tiga tahap berikut.

1. Tahap persiapan *go public*

Beberapa hal yang sering dilakukan dalam tahap ini, yaitu sebagai berikut.

a. Restrukturisasi perusahaan

Proses restrukturisasi suatu perusahaan dapat berupa restrukturisasi finansial, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi korporat, restrukturisasi SDM, serta restrukturisasi utang. Restrukturisasi finansial, yaitu usaha untuk melakukan perombakan aspek permodalan dan saham dari suatu perusahaan seperti revaluasi aset, menjual anak perusahaan yang merugi, dan pelunasan utang bank untuk menekan

biaya. Restrukturisasi bisnis dilakukan dengan mengutak-atik bisnis perusahaan itu sendiri, misalnya kembali ke bisnis inti (*core business*), pengurangan usaha, atau penjualannya diperbesar. Restrukturisasi korporat, yaitu perombakan perusahaan yang sering dikenal dengan istilah reorganisasi perusahaan, seperti merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan perseroan. Restrukturisasi SDM, yaitu perubahan posisi dan jabatan SDM perusahaan dengan mengacu pada *the rights man on the rights jobs*. Restrukturisasi utang yang dilakukan melalui pendekatan dan negosiasi dengan para kreditor, seperti penjadwalan kembali utang, perubahan utang menjadi *equity*, dan lain-lain.

b. Pembersihan surat dan dokumentasi lainnya

Pembersihan surat dan dokumentasi dilakukan terhadap surat dan dokumentasi yang membutuhkan waktu lama dalam mempersiapkannya. Dengan demikian, surat dan dokumentasi tersebut harus dibereskan jauh-jauh hari agar tidak menjadi kendala.

c. Proses *private placement*

Proses *private placement* biasanya dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera, sementara proses penawaran umum belum masih disiapkan. *Private placement* merupakan kebalikan dari penawaran umum perdana.

2. Tahap pendahuluan *go public*

Pada tahap ini dilakukan hal-hal berikut.

a. Pemilihan pihak yang terlibat

Emiten harus menentukan pihak-pihak mana saja yang akan ikut dalam proses *go public*. Pihak-pihak yang berperan dalam *go public* biasanya adalah akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Keempat profesi ini sering dinamakan profesi penunjang pasar modal.

b. Proses *underwriting*

Proses penjaminan emisi dilakukan antara emiten dan *underwriter*. Terdapat tiga bentuk perjanjian penjaminan emisi. Ketiga bentuk tersebut yaitu sebagai berikut.

1) *Full Commitment* (komitmen penuh)

Dalam komitmen penuh, jika saham tidak habis terjual di pasar perdana, *underwriter* harus membeli seluruh sisa saham yang tidak terjual.

2) *Best Effort Commitment* (komitmen terbaik);

Dalam komitmen terbaik, jika saham tidak habis terjual di pasar perdana, pihak *underwriter* dapat mengembalikan kepada emiten tanpa kewajiban untuk membelinya.

3) *Stand by Commitment* (Komitmen Siaga)

Dalam komitmen siaga, sisa saham yang tidak habis terjual di pasar perdana dapat dibeli oleh *underwriter* pada harga tertentu.

c. Restrukturisasi anggaran dasar

Perlu dilakukan restrukturisasi terhadap anggaran dasar perusahaan, seperti masalah permodalan perusahaan, jumlah saham yang harus diperbanyak, ada penyebutan bahwa sejumlah saham akan dijual kepada publik, harga nominal saham yang disesuaikan dengan ketentuan pasar modal, cara peralihan saham, persyaratan direksi dan komisaris, pemegang saham tidak harus warga negara Indonesia, keuangan harus diaudit oleh akuntan publik, ketentuan wajib lapor ke Bapepam, kuorum, penggunaan laba hasil *go public*, dan lain-lain.

d. Pembuatan laporan dan dokumentasi *go public*

Banyak sekali laporan maupun dokumentasi *go public* lainnya yang wajib dibuat oleh perusahaan atau pihak terkait dalam proses *go public* dari perusahaan yang bersangkutan.

Pembuatan laporan atau dokumentasi lain tersebut umumnya dilakukan dengan tujuan agar terciptanya *disclosure* bagi pihak investor atau bagi pihak pengawas ataupun bagi pihak penyelenggara pasar. Salah satu dokumen yang harus dibuat, yaitu perjanjian penjaminan emisi.

e. Pencatatan pendahuluan di bursa efek

Pencatatan efek di bursa efek dilakukan guna proses pelaksanaan *go publik*. Efek yang diperjualbelikan harus efek yang telah dicatatkan (*listing*).

3. Tahap pelaksanaan *go publik*

Pada tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Proses pernyataan pendaftaran

Menurut Pasal 70 UUPM menyatakan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah menyampaikan suatu dokumen yang disebut pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut tidak efektif. Keharusan ini tidak berlaku untuk penawaran umum:

- 1) Penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh tempo-nya tidak lebih dari satu tahun;
- 2) Penerbitan sertifikat deposito;
- 3) Penerbitan polis asuransi;
- 4) Penawaran efek yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Indonesia;
- 5) Penawaran efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Kewajiban mengajukan pernyataan pendaftaran tidak hanya untuk emiten, tetapi juga untuk perusahaan publik yang bukan emiten.

b. *Public expose*

Suatu proses ketika emiten mengumumkan kepada publik, termasuk media masa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaannya dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada. Di samping *public expose* dikenal juga mini *public expose* yang mirip dengan *public expose*, tetapi ini dilakukan setelah penyampaian pendaftaran kepada Bapepam.

c. Pembuatan prospektus

Prospektus merupakan salah satu dokumen yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran. Prospektus terdiri atas prospektus lengkap dan prospektus ringkas. Prospektus lengkap biasanya dibuat dan diserahkan kepada Bapepam dalam pernyataan pendaftaran, sedangkan prospektus ringkas biasanya dimuat dalam surat kabar.

d. *Road show*

Emiten bersama-sama dengan pihak terkait memperkenalkan efek kepada masyarakat investor. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pasar dapat menyerap penawaran saham.

e. Penjatahan

Penjatahan terjadi apabila jumlah pemesanan lebih besar daripada efek yang akan dikeluarkan. Guna memberikan rasa keadilan kepada investor/pemesan maka dilakukanlah penjatahan sehingga semua investor mendapatkan efek.

f. Proses pencatatan

Efek-efek yang akan diperdagangkan di bursa efek biasanya harus dicatatkan terlebih dahulu. Proses pencatatan ini dinamakan *listing*. Efek yang tidak dicatatkan terlebih dahulu di bursa efek maka efek tersebut tidak boleh diperdagangkan di bursa efek. Kebalikan dari proses pencatatan adalah pencoretan pencatatan atau dikenal dengan istilah *delisting*.

g. Kegiatan di pasar sekunder

Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam dan emiten telah melakukan proses pencatatan di bursa efek maka dimulailah proses perdagangan efek di pasar sekunder. Harga efek di pasar sekunder lebih banyak ditentukan oleh penawaran dan pembelian efek itu sendiri. Apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, biasanya harga efek tersebut akan menurun. Sebaliknya, apabila penawaran lebih sedikit dari permintaan, harga efek akan meningkat. Di samping faktor penawaran dan permintaan, masih ada faktor lain yang memengaruhi harga efek, yaitu faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

Transaksi efek di pasar sekunder telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Misalnya, di Bursa Efek Jakarta telah lama menggunakan *Jakarta Automated Trading System* atau disingkat JATS. JATS sendiri merupakan sistem perdagangan efek yang berlaku di Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer. Kemudian, berkembang mekanisme transaksi, seperti *scriptless trading*, *remote trading*, dan *online trading*.

Scriptless trading adalah suatu perdagangan saham yang penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik. Setiap kali transaksi, mutasi saham dan uang, cukup dilakukan melalui pemindahbukuan (*book entry settlement system*) pada rekening pihak yang terlibat dalam transaksi seperti layaknya rekening pihak yang terlibat dalam transaksi seperti layaknya rekening di bank.

Scriptless trading sering juga dikenal dengan sistem perdagangan tanpa warkat, yaitu penyelesaian transaksi dengan mendebet dan mengkredit efek pada rekening kustodian. Informasi jual beli saham disimpan dalam file-file komputer. Sebelum *scriptless trading* bukti

kepemilikan saham adalah berwujud secara fisik dengan sertifikat/surat saham.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah menggunakan *remote trading*, sedangkan Bursa Efek Surabaya (BES) telah menggunakan *online trading*. *Remote trading* adalah sistem perdagangan jarak jauh; setiap order transaksi di kantor *broker* (perusahaan efek) langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek dengan menggunakan sistem JATS tanpa perlu memasukan order dari lantai bursa (*trading floor*). Setelah *remote trading*, akan dilanjutkan dengan *online trading*, yaitu perdagangan yang menggunakan sistem *online* yang melibatkan jasa penyedia layanan *profider*. *Online trading* telah diberlakukan secara terbatas di Bursa Efek Surabaya, tetapi masih terbatas di perusahaan efek dalam rangka memudahkan investor dalam melakukan transaksi efeknya.

Sebagai perubahan yang akan menjadi perusahaan publik, perusahaan tersebut harus menerapkan prinsip keterbukaan penuh (*full disclosure*). Tuntutan *full disclosure* tidak hanya sebelum *go public*, tetapi juga setelah *go public*.

Full disclosure sendiri harus makna dengan adanya keterbukaan secara penuh atas segala informasi yang bersifat material terhadap investor dan pihak-pihak yang terkait. Namun, ada sarjana yang tidak setuju apabila hanya dituntut *full disclosure* mengingat ada sisi lain yang harus dirahasiakan pada emiten, yaitu rahasia dagang dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, sarjana tersebut lebih senang menggunakan istilah *full and fair disclosure* atau keterbukaan yang penuh dan bertanggung jawab atau adil.

Sebelum melakukan penawaran umum, terlebih dahulu emiten harus menyiapkan segala informasi yang akan dimuat dalam prospektus, baik lengkap maupun ringkas kepada Bapepam dan masyarakat.

Suatu prospektus harus benar-benar berisikan informasi penting yang dipublikasikan kepada publik, apalagi informasi tersebut bersifat material yang dapat memengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasinya di perusahaan emiten. Menyimak Pasal 79 Ayat (1) UUPM bahwa setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan (*misleading prospectus*).

Tanggung jawab atas adanya informasi yang menyesatkan dapat ditempuh investor guna meminta pertanggungjawaban atas semua kerugian investor sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UUPM. Tidak hanya keterbukaan tersebut, dalam prospektus keterbukaan informasi harus juga dilakukan dalam pernyataan pendaftaran.

Kewajiban untuk adanya *full disclosure* ternyata tidak hanya bagi emiten yang akan *go public*, tetapi juga melekat kewajiban tersebut setelah perusahaan menjadi perusahaan publik. Hal tersebut dapat tersirat dari isi Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 UUPM.

Keterbukaan informasi setelah *go public* berupa penyampaian laporan rutin kepada Bapepam. Penyampaian laporan dilakukan setiap tiga bulan dan disampaikan kepada Bapepam.

Dalam kegiatan pasar modal, terdapat beberapa bentuk pelanggaran, yaitu sebagai berikut.

1. Penipuan dan Pengelabuan

Penipuan termasuk tindak pidana pasar modal. Adapun yang tergolong tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut.

- Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan saran dan atau cara apapun (*vide* Pasal 90 Ayat (1) UUPM).
- Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain (*vide* Pasal 90 Ayat (2) UUPM).

Pihak yang melakukan tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal, maupun pihak yang turut serta dalam tindak pidana

penipuan dan pengelabuan, diancam dengan hukum penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp15 miliar.

2. Manipulasi Pasar

Tindak pidana manipulasi pasar, yaitu sebagai berikut.

- Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan sekongkolnya juga melakukan penawaran beli atau penawaran jual pada harga yang kurang lebih sama (Pasal 91 UUPM).
- Melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga mengakibatkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual, atau menahan efek tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan permintaan jual atau beli yang sesungguhnya (Pasal 92 UUPM).
- Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara material tidak benar, yang dapat memengaruhi harga efek atau dengan tujuan untuk memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Pihak yang melakukan tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal, maupun pihak yang turut serta dalam tindak pidana penipuan dan pengelabuan, diancam dengan hukum penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp15 milyar.

Berikut ini diuraikan salah satu contoh gambaran tindakan manipulasi pasar.

Indikasi pelanggaran yang terjadi, yaitu penyesatan informasi tentang rencana aksi korporasi sejumlah perusahaan terbuka di Indonesia. Penyesatan ini mengakibatkan informasi simpang siur sehingga membuat investor semakin panik dan akhirnya menjual saham dengan harga yang murah.

Di samping itu, terdapat perbedaan informasi yang dikemukakan oleh komisaris dengan direksi perusahaan asing tentang jadi tidaknya pelaksanaan penawaran tender saham perusahaan terbuka di Indonesia yang baru saja diambil alih.

Informasi yang menyesatkan lainnya, yaitu tentang ketidakjelasan informasi gadai saham sejumlah perusahaan terbuka di Indonesia dan penundaan akuisisi sebuah bank.

Semua informasi yang tidak benar yang membuat panik para investor sangat jauh dari prinsip keterbukaan di Pasar Modal. Hal ini sering menimbulkan kerugian bagi investor kecil karena salah dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham. Informasi yang menyesatkan juga telah melanggar Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal yang menyebutkan bahwa setiap pihak dilarang secara langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun serta dilarang membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material.

Adanya tindakan manipulasi pasar teridentifikasi dari ambruknya indeks harga saham gabungan sebesar 22,17% hanya dalam waktu tiga hari.

Berikut ini taktik spekulasi menurunkan harga.

- 1) Spekulasi Ingin membeli saham dengan harga rendah;
- 2) Isu negatif dihembuskan oleh spekulasi;
- 3) Spekulasi menjual sebagian saham dengan harga murah untuk memperkuat isu negatif;
- 4) Publik panik;
- 5) Publik melakukan aksi jual besar-besaran;
- 6) Saham turun;
- 7) Spekulasi memborong saham dengan harga murah;
- 8) Spekulasi mengambil untung besar.

Berikut ini taktik spekulasi menaikkan harga.

- 1) Spekulasi Ingin menjual saham dengan harga tinggi;
- 2) Isu positif dihembuskan oleh spekulasi;
- 3) Spekulasi membeli sebagian saham dengan harga tinggi untuk memperkuat isu;
- 4) Publik terpancing;
- 5) Publik melakukan aksi beli besar-besaran;
- 6) Harga saham naik;

- 7) Spekulasi menjual saham dengan harga tinggi;
- 8) Spekulasi memperoleh untung besar.

3. Insider Trading

Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan (dalam arti luas), perdagangan tersebut didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan pihak pedagang *insider* tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau merupakan keuntungan jalan pintas.

Unsur-unsur *insider trading*, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya perdagangan efek;
- b. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan;
- c. Adanya *inside information*;
- d. *Inside information* tersebut belum terbuka untuk umum;
- e. Perdagangan dimotivasi oleh adanya *inside information*;
- f. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak.

Biasanya orang-orang dalam yang terlibat dalam *insider trading* adalah sebagai berikut.

- a. Komisaris, direktur, atau pegawai perusahaan terbuka;
- b. Pemegang saham utama perusahaan terbuka;
- c. Orang yang karena kedudukannya, profesinya, atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam;
- d. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam Poin 1, 2, dan 3 sebelum jangka waktu 6 bulan.

Informasi orang dalam adalah informasi yang bersifat materi yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Informasi atau fakta materi, yaitu informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.



Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir, Fuady. 1995. *Hukum Pasar Modal 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riduan, Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sudaryat. 2008. *Hukum Bisnis: Suatu Pengantar*. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Sudaryat. 2008. *Legal Officer*. Bandung: Oase Media.
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Lindsey, (et.al). 2004. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.